PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Sekretariat Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Jember, Desember 2022
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 2 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**

DAFTAR TABEL **iii**

DAFTAR GAMBAR **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **12**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 12

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah 13

2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris 13

2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang..... 13

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah 15

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana 16

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 22

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 22

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 23

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 26

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga 26

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi 26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 26
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 26
3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS) 27
3.5 Penentuan isu-isu strategis 28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 37
BAB VIII PENUTUP 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) 16

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 16

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember 20

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan 25

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 45

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L 26

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi 26

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA 60

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah 30

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan 33

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember 35

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 *Logical Framework* Kabupaten Jember 31

Gambar 4.2 *Cascading* **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Sekretariat Daerahjuga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Sekretariat Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Sekretariat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Sekretariat Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan …..

Dalam menyusun Renstra Perubahan Sekretariat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Sekretariat DaerahTahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Sekretariat Daerah harus

menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Sekretariat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;

2. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Sekretariat Daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember maka Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi meliputi :

a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah ;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , terdiri dari:

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
   1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
   2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
   3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
      a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
      b. Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
   1. Bagian Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
   2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
   3. Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempuyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga daerah, memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan

kegiatan Sekretariat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Sekretaris daerah juga mempunyai fungsi :

a. Perumusan sasaran pelaksanaan operasional program dan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta administrasi dengan memadukan program kerja Pemerintah dan di sesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
c. Pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
d. Pengendalian kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah melalui rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
e. Penyampaian saran pertimbangan dan/atau telaahan staf kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan;
f. Pendistribusian tugas kepada para Asisten, Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah maupun para Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

g. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya;dan
h. Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat memperoleh kebenaran dan perkembangannya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerjasama dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama..

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan dan hukum;
b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejaheraan rakyat
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang tata pemerintahan, hukum;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintaahan, hukum;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;dan
g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.2.1 Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Tata Pemerintahan menpunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
d. Penyiapana bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;dan
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat menpunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;dan
e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban ats pelaksanaan tugas.

2.1.2.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Hukum menpunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
e. Penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;
f. Pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintah desa;
g. Penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa;
h. Pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat;
i. Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah;
j. Pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hukum baik secara litigasi dan nonlitigasi;
k. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
l. Penyusunan program legislasi daerah;

m. Pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;dan
o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya;dan
g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan tugas.

2.1.3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijkan daerah di bidang:

a. pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
b. Sumberdaya pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menpunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
c. Penyiapan bahan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan dan faktor yang mepengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
d. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
e. Penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian, pembinaan serta promosi produk lokal;
f. Pelaksanaan pemantauan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang perekonomian;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;dan
h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3.2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

a. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan Pelaporan; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan ;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
d. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;
e. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
f. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pengelolaan APBD;

g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan

h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3.3. Bagian Pengadaan Barang Jasa

Bagian Pengadaan Barang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Pengadaan Barang Jasa menpunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang organisasi;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Organisasi, Umum dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.4.1 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,

pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya;dan
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4.2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi serta tugas lain yang diberikan oelh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dimaksud mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
c. Penyiapanan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
d. Pelaksanaan aacra kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun di luar negeri;
e. Pelaksanaan penyampaian nucapan duka dan selamat;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tuigasnya;dan
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.4.3 Bagian Umum

Bagian Umum mepunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pematauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum dimaksud mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan pematauan dan evalusai dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Derah, asisten dan staf ahli;
d. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris daerah, Asisten dan Staf Ahli;
e. Pelaksanaan urusan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris daerah;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya;dan
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

d) Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagimana Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Gambar: 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

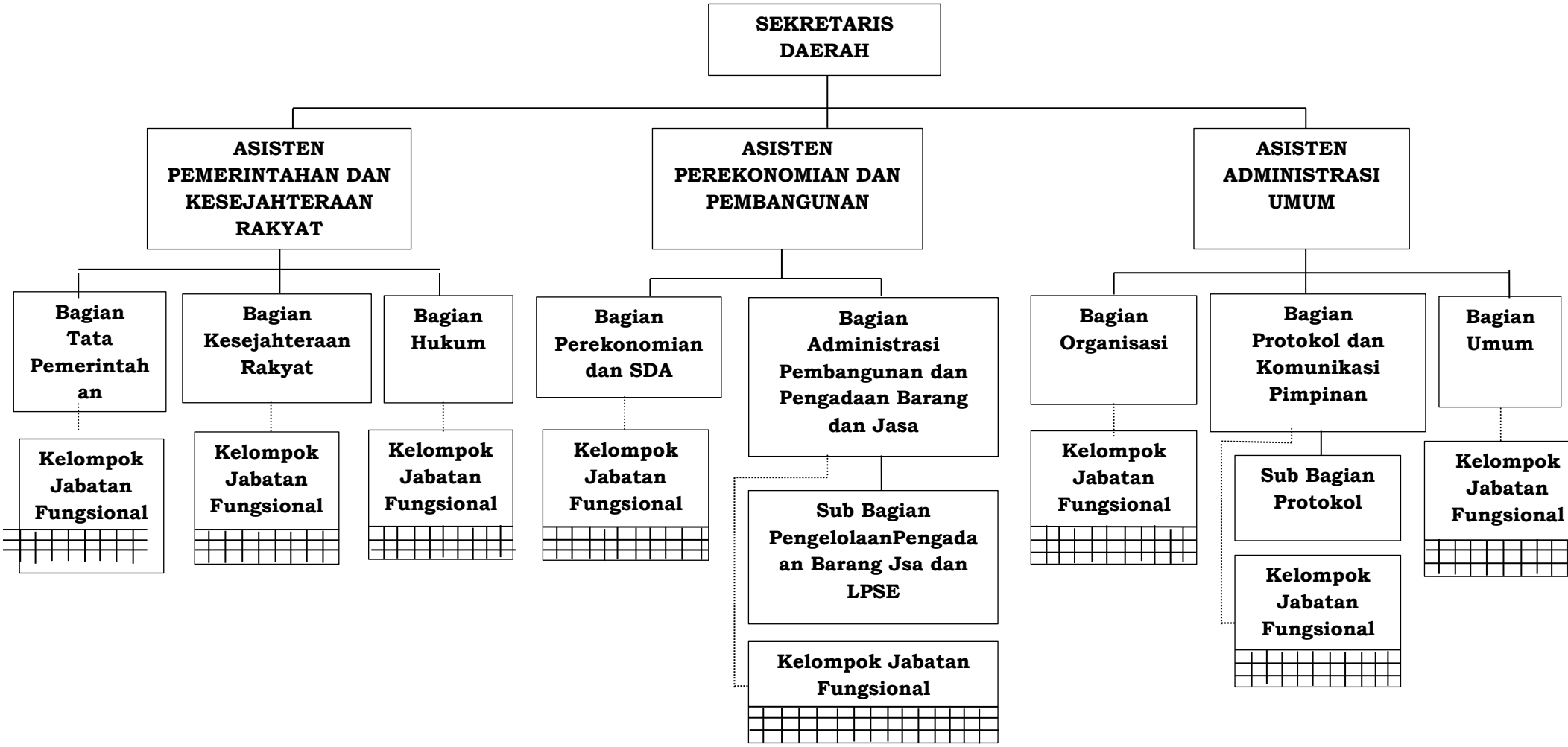

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sekretariat Daerah sesuai struktur organisasi dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 6 (enam) orang
2. Eselon III : 4 (empat) orang
3. Eselon IV : 2 (dua) orang
4. Pejabat fungsional : 19 (sembilan belas) orang
5. Staf (Non Eselon ASN) : 100 (seratus)
6. Staf non ASN : 120 (seratus dua puluh).

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan ASN yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 15
2. Sarjana S-1 : 24
3. Diploma -3 : 5
4. Diploma -4 : 3
5. SLTA : 67
6. SLTP : 9
7. SD : 8

Tabel 2.3
Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
Sekretariat Daerah

NO	ESELON	ASN	NON ASN	TOTAL	KET
1.	Bagian Hukum	8	5	14	Data per 1 Desember 2022
2.	Bagian Tata Pemerintahan	8	9	17	
3.	Bagian Perekonomian	8	1	9	
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2	14	
5.	Bagian Administrasi Pembanguna dan PBJ	8	15	23	
6.	Bagian Organisasi	9	4	13	
7.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	18	30	
8.	Bagian Umum	64	66	130	
	Jumlah	**131**	**120**	**251**	

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.4

Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin		unit		1.079.192.000
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan		paket		35.000.000
	Jumlah Nilai Aset Tetap					1.114.192.000

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Kesejahteraan Rakyat						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				1.619.351.720
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					1.619.351.720

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Admistrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				4,133,442,857

3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					4,133,442,857

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Perekonomian dan SDA						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	1	paket	-	1.029.168.580
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap		1	paket	-	1.029.168.580

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Tata Pemerintahan						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	163	unit	-	984.389.514
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap		163	unit	-	984.389.514

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Hukum						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-

2	KIB B	Peralatan dan Mesin	151	unit		877.315.150,00
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					877.315.150,00

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Organisasi						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				1.067.873.000
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				-
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					1.067.873.000

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Umum						
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**
1	KIB A	Tanah				-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				5.442.527.215
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				36.301.890.710
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				
	Jumlah Nilai Aset Tetap					41.744.417.925

Nilai aset tetap yang dimiliki/ dikuasasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 52.570.150.746 (lima puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember , maka Sekretariat Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Bagian dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		-	-	-	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	55	65	70	75	75	55	65	70	75	75
2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	-	-	-	50	70	70	75	80	50	55	60	65	70	100	78,6	85,7	86,67	87,5
3	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

6	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan memiliki kinerja sesuai pedoman	-	-	-	100	100	100	100	100	65	75	85	87	90	65	75	85	87	90
7	Persentase kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Kebijakan penataan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	n.a	n.a	n.a
1	Jumlah event yang diikuti/dilaksanakan	-	-	-	70	90	90	90	90	70	90		90	90	1	1	-	1	1
2	Persentase Calon jamaah Haji tiba di tanah suci dan kembali ke tanah air	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1
3	Jumlah kegiatan keagamaan yang terselenggara	-	-	-	50	90	90	90	100	50	90		90	100	1	1	-	1	1
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1

5	Presentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	-	-	-	66	66	66	100	66	66	66		100	66	1	1	-	1	1
6	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1
7	Persentase tingkat partisipasi	-	-	-	0	100	100	100	100	0	100		100	100	####	1	-	1	1
8	Pesentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1	1	-	1	1
1	Produk hukum yang dikeluarkan	-	-	-	358	360	473	570	460	365	533	464	507	539	1,02	1,48	0,98	0,889	1,17
2	Sosialisasi Produk Hukum	-	-	-	10	3	5	5	5	10	3	5	5	5	1	1	1	1	1
3	Penyuluhan Hukum	-	-	-	8	23	12	12	12	8	23	12	12	12	1	1	1	1	1
4	Pengurusan Perkara	-	-	-	4	7	8	8	8	4	7	8	8	5	1	1	1	1	0,63
5	Pembinaan Kelompok Kadarkum	-	-	-	3	5	4	6	6	3	5	4	6	6	1	1	1	1	1
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi BUMD PDP Kahyangan Jember (%)				2	2	3	4	5	-1	-0,001	-17	-7,42	-7,58	-50	-0,05	####	#####	####

2	Persentase Peningkatan Nilai Produksi BUMD PDAM Jember (%)				8	8	8	9	9	0,008	0,007	0,001	2,19	1	0,1	0,09	0,01	24,33	11,11
	Jumlah Ketersediaan Buku SSH, ASB, Pedum	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di 69 OPD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Operasional Aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	96	96	96	100	100	96	96	96
1	Prosentase terlaksananya urusan administrasi tata usaha pimpinan	-	-	-	100	100	100	100	100	79,3	89	90,99	54,86	71,54	79,3	89	90,99	54,86	71,54
2	Prosentase terlaksananya urusan keuangan Bupati/Wakil Bupati,Sekda,Asisten dan Staf ahli	-	-	-	100	100	100	100	100	83,77	89,55	84,94	67,52	60,49	83,77	89,55	84,94	67,52	60,49
3	Prosentase urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	-	-	-	100	100	100	100	100	71,43	76,2	96,07	94,59	77,66	71,43	76,2	96,07	94,59	77,66

4	Prosentase terlaksananya urusan penjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati,Asisten dan Staf Ahli	-	-	-	100	100	100	100	100	51,53	68,09	69,44	72,03	50,51	51,53	68,09	69,44	72,03	50,51
5	Prosentase penerimaan daerah dari sewa Balai Serba Guna dan Wisma Daerah Prajamukti	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
6	Prosentase terlaksananya laporan pertanggungjawaban	-	-	-	100	100	100	100	100	71,12	97,62	93,55	89,91	62,69	71,12	97,62	93,55	89,91	62,69
1	Persentase PD yang Menyusun Laporan Kinerja Sesuai Pedoman				40	60	80	90	100	50	78	78	80	80	125	130	98	89	80
2	Persentase PD yang Menyusun Perjanjian Kinerja Sesuai Pedoman				20	30	50	75	100	18	23	55	80	100	90	76	110	106	100
3	Persentase PD yang memiliki Budaya Kerja (KBK) yang berfungsi dengan baik				10	30	40	50	60	4	4	6	6	6	40	13	15	12	10
4	Persentase Hasil Monev Kelembagaan Yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

5	Prosentase PD yang Menyusun Analisis Jabatan Sesuai Pedoman				60	60	100	100	100	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase PD yang Menyusun Standar Kompetensi Manajerial/Jabatan (SKJ) Sesuai Pedoman				60	60	100	100	100	10	10	10	10	10	16	16	10	10	10
7	Persentase PD yang Menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan (SP)				20	50	70	80	100	20	28	30	50	60	100	56	43	63	60
8	Persentase PD yang Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)				20	50	70	80	100	21	28	30	50	60	105	56	43	63	60
9	Persentase SPM yang diterapkan dan dilaporkan				66	66	100	100	100	66	73	100	100	100	100	110	100	100	100
10	Persentase PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik				3	5	7	9	10	2	4	5	6	6	67	80	71	67	60
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	100	92.8 %	88,70 %	86%	96%	61%	1	1	1	1	1

2	Presentase Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	89.4 %	75,60 %	87%	95,40 %	94%	1	0,7	0,8	0,9	0,9
3	Presentase Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100	84.7 %	95%	99%	98,90 %	86%	0,8	0,9	1	1	0,9
4	Presentase Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	100	100	100	100	100	100 %	76,20 %	90%	0	0	1	0,9	0,9	0	0
5	Presentase Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	100	100	100	100	100	100 %	91,60 %	0	100%	0%	1	0,9	0	1	0
6	Presentase Prog. Kerjasama Informasi dengan Media Massa	-	-	-	100	100	100	100	100	98.7 %	60%	73%	80%	0%	1	0,6	0,7	0,8	0
7	Presentase Pengembangan Dokumentasi Dan Informasi	-	-	-	100	100	100	100	100	0	91&	98%	90%	54%	0	0,9	0,9	0,9	0,5
8	Presentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	0	43%	86%	99%	78%	0	0,4	0,8	1	0,7

Narasi:.....

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	%	%	%	%	%	%
Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah	125.	150	150	230	40	Rp -	44.949,4	48.522,2	26.832,2	Rp -							
PAD																	
Dana Perimbangan / Transfer	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain lain Pendapatan yang sah	125	150	150	230	40	Rp -	44.949,4	48.522,2	26.832,2	Rp -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Total Pendapatan	125	150	150	230	40	Rp -	44.949,4	48.522,2	26.832,2		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Belanja Daerah/ Perangkat Daerah	104.423,9	102.209,4	112.468,9	131.956,3	85.253,1	26.959,7	28.447,1	90.624,8	49.252,5	6.196,5							
Belanja Tdk Langsung	42.395,1	36.200	11.758,6	11.133,7	36.534,4			10.803,1	9.890,6	0%	0%	0%	0%	0%	0 %	0%	0
Belanja Langsung (Bag. Organisasi)	1.464,5	1.649,2	1.649,2	1.500	1.252,6	1.452,6	1.513,1	1.090,3	1.293,3	771	0,992	0,917	0,661	0,86	0,61611		
Belanja Langsung (Bag. Prokopim)	3.347,4	8.656,8	10.692,9	18.685,5	6.110	3.256,8	7.089,6	8.728,6	16.095,1	3.697	0,973	0,819	0,816	0,86	0,60509		

Belanja Langsung (Bag. Tapem)	11.100,5	6.792,9	2.959,6	2.000	2.730	4.850,7	2.105,2	1.808,2	1.580,7	71,41	71,13	90,41	57,90	0,00	-163,59		
Belanja Langsung (Bag. Kesra)	4.927,2	6.792,9		8.147,8	4.765,2	4.850,7		6.240	1.181,7	69,90	71,41	-	76,58	24,80	-3,29	-75,64	
Belanja Langsung (Bag Ekonomi)	3.653,2	3.653,2	1.750	1.471,3	2.320.,3	2.704,3	3.097,7	1.412,2	9.695,2	7.095,4	74,03	84,79	80,70	8,6	-4,06		
Belanja Langsung (Bag. Hukum)	785,9	905,3	902,3	835,3	905,9	859,5	824,3	779,2	810,1	0,949475241	0,914	0,933	0,894	0	1,1E-09	7,7	
Belanja Langsung (Bag. Umum)	21.304,4	21.658,9	48.803,2	54.904,1	25.480,4			37.719,1	720,7		0	0,687	0,028	####	#DIV/0!		
Belanja Langsung (Bag. AP.PBJ)	15.445,3	15.899,9	33.952,8	33.278,4	5.153,8	8.984.,7	13.817	22.043.,7	17.679,9	1.727,6	0,58	0,87	0,65	0,53	0,34		

Narasi:.....

*)

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Sekretariat Daerahdapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Sekretariat Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal
    a. Kekuatam
        1) Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang besar
        2) Komitmen Pimpinan lembaga untuk mendukung program, dan Visi Misi Pemerintah Daerah
        3) Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

    b. Kelemahan
        1) Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku
        2) Belum siapnya aparatur pada jabatan Fungsional sebagai dampak penyetaraan Jabatan Pasca Penyederhanaan Birokrasi

2. Faktor Eksternal
    a. Peluang

1) Perkembangan Teknologi Informasi membuka peluang untuk mengoptimalkan *e-Government* dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2) Perubahan Sistem Kerja Aparatur Pasca Penyederhanaan Birokrasi

b. Tantangan
1) Partisipasi Perangkat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan program Pemerintah Kabupaten
2) Mengubah pola pikir / *mindset* aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)
3) Meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan keterbukaan informasi pada di era digital

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Jember, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan Pelayanan Bagian Hukum			
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**
1	Harmonisasi dalam penyusunan produk hukum daerah	1. Belum berjalannya system pengendalian penyusunan produk hukum daerah	1. Kurangnya SDM di yang memiliki kompetensi sebagai Analis Peraturan Per UU an; dan Fungsional perancang peraturan per UU-an 2. Ketersediaan SDM di Bagian Hukum tidak sebanding dengan beban kerja fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 3. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyusunan produk hukum daerah; 4. PD kurang memahami dinamika perubahan

			peraturan per UU-an dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pengaturan berupa PERDA
2	Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH)	Kurang optimalnya publikasi Produk Hukum Daerah	1. Ketersediaan SDM di Bagian Hukum tidak sebanding dengan beban kerja fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Kurang Optimalnya Sarana Prasarana pendukung
Permasalahan Pelayanan Bagian Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang /Jasa			
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**
1	Fasilitasi Pelayanan dalam urusan administrasi pem-bangunan dan pelayanan pengadaan B/J pemerintah	Monev, Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi terhadap kegiatan yang terkendala dalam proses pelaksanaannya.	1. Monev kegiatan belum berjalan optimal. 2. Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan kegiatan. 3. Kurangnya koordinasi dan konsultasi, penyelesaian masalah atau kendala kepada TAPD.
	Kebijakan daerah terkait pedoman	Pedoman penyusunan	1. Kurangnya pemahaman

	pelaksanaan APBD	anggaran belum sepenuhnya selaras dan mengacu peraturan / pedoman berlaku	aparatur terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat terkait pedoman penyusunan anggaran 2. Usulan SSH, HSPK atau ASB yang akan menjadi pedoman perencanaan PD tidak memiliki data dukung yang akurat karena fluktuasi harga dan nilai tukar rupiah.
	Pengukuran impact hasil intervensi kadang tidak bisa diukur dengan indikator secara jelas.	Indikator pengukuran evaluasi kurang jelas	Hasil intervensi sebagian tidak bisa dirasakan secara langsung, karena kurangnya tim evaluator
	Optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PB/J)	Pelaksanaan PB/J terdapat banyak kendala sehingga tidak tepat waktu sesuai perencanaan	• Kurangnya Personil pengadaan pada UKPBJ • Kurangnya pemahaman aparatur PD terkait pedoman / ketentuan Pelaksanaan PB/J , pemanfaatan LPSE, maupun penggunaan Produk Dalam negeri (PDN) dalam PB/J • Kurangnya pembinaan, monev, koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi terhadap kendala

			pengelolaan PB/J, dan pengelolaan LPSE
	Kemandirian kelembagaan pengadaan barang/jasa (PB/J)	• Kurangnya Kemandirian kelembagaan PB/J • Belum optimalnya pengelolaan LPSE	• Belum dilaksanakannya penetapan kebijakan perubahan kelembagaan PB/J • belum terpenuhinya formasi jabatan fungsional pengadaan • Kelembagaan pengadaan barang dan jasa masih bersifat *ad hoc*, dimana unit PB/J merupakan sub bagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan PB/J • Kurangnya pemanfaatan LPSE oleh PD
	Permasalahan Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat		
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**
1	Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji	Belum Optimalnya Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji	1. Embarkasi haji yang masih berada di ibu kota Provinsi. 2. Titik kumpul jama'ah yang jauh dari tempat tinggal jama'ah karena menyesuaikan dengan lokasi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).

			3. Kurang optimalnya pengaturan terkait tTingginya antusiasme masyarakat dalam mengantar dan menjemput jama'ah haji. 4. Kurangnya kecukupan sarana dan prasarana (transportasi, dll) di titik pemberangkatan
2	Pelaksanaan musabaqoh tilawatil Qur'an	1. penjaringan bakat dan pembinaan untuk melaksanakan kegiatan MTQ secara berjenjang tidak maksimal 2. Kurangnya antusiasme peserta lomba MTQ	• Kurangnya SDM dan dukungan anggaran dari tingkat desa dan kecamatan • Kurangnya SDM Juri bersertifikat untuk menjadi juri di setiap desa dan kecamatan. • Kurangnya publikasi lomba MTQ sampai ke pelosok desa
3	Pengelolaan Data tempat dan pengurus tempat ibadah serta data lembaga pendidikan keagamaan dan tenaga pengajar	Kurangnya akurasi Data tempat dan pengurus tempat ibadah serta data lembaga pendidikan keagamaan dan tenaga pengajar	1. Belum tersedianya sistem informasi terpadu yang berbasis *online* yang memudahkan penyusunan *database* tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan se Kabupaten Jember

			3. Kurangnya koordinasi dalam rangka pembangunan system informasi terpadu 4. Kurangnya ketersediaan SDM dalam rangka verifikasi data 5. Belum adanya system pengendalian dan verifikasi data tempat ibadah serta data lembaga pendidikan keagamaan dan tenaga pengajar
4	Pelaksanaan kegiatan religi / peringatan hari hari besar di masyarakat	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam yang monoton bersifat rutin / seremonial dan kurang memberikan dampak terhadap kondusivitas kehidupan antar umat beragama	1. Kurangnya optimalnya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman , keimana dan ketakwaan umat beragama 2. Kurangnya sinergi antar stakeholder dalam membangun kondusivitas kehidupan antar umat beragama
Permasalahan Pelayanan Bagian Organisasi			
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**

1	Penerapan Reformasi Birokrasi	Penerapan Reformasi Birokrasi belum optimal dan belum menyeluruh sampai perangkat Daerah	1. *Mindset*/pola pikir/pemahaman Sebagian besar aparatur terkait reformasi birokrasi yang dipandang hanya merupakan tugas fungsi dan kegiatan PD tertentu. 2. Kurangnya sinergitas antara PD penanggung jawab 8 area perubahan reformasi birokrasi 3. Masih lemahnya pemahaman PD pengampu 8 area perubahan RB dalam mengawal jalannya reformasi birokrasi sesuai tusinya
2	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja belum berjalan secara optimal.	1. Dokumen Perencanaan (RPJMD dan Renstra) yang merupakan dasar pelaksanaan SAKIP belum memenuhi kaidah akuntabilitas 2. Evaluasi kinerja internal yang dilakukan belum memberikan feedback bagi perbaikan SAKIP 3. Belum terbangun system Pengukuran dan pengelolaan data kinerja berkala dalam kerangka

			mengendalikan capaian kinerja PD 4. Komitmen pimpinan dalam pemanfaatan SAKIP untuk meningkatkan kinerja masih kurang optimal 5. *Mindset* terkait SAKIP dipandang sebagai pemenuhan dokumen belum pada pemanfaatan 6. Kurangnya kompetensi SDM perencanaan / pengelola data kinerja 7. Kurangnya sinergitas antara Inspektorat, BAPPEDA dan Sekretariat Daerah dalam penerapan kebijakan terkait SAKIP
3.	Pelayanan publik	Pelayanan publik belum optimal	1. Sarana prasarana pada UPP belum terpenuhi sesuai standar UU No. 25 Th 2009 2. Belum terintegrasinya pelayanan publik berbasis IT. 3. Kurang optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik. 4. Rendahnya tingkat inovasi pelayanan publik. 5. Kurangnya kepatuhan PD

			terhadap ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Belum tuntasnya pelaksanaan program *Smart City* dan E-*Government*
4.	Tatalaksana pemerintahan.	Belum optimalnya tatalaksana pemerintahan.	1. Belum adanya kebijakan daerah terkait instrumen pengendalian dan evaluasi SOP. 2. Belum optimalnya penerpan sistem pemerintahan berbasis elektronik/ SPBE 3. Sebagian besar PD belum melakukan evaluasi berkala terhadap SOP 4. Belum tersusunnya peta proses bisnis pasca penyederhanaan Birokrasi
5.	Penyederhaan birokrasi	Belum optimalnya tindak lanjut penyederhaan birokrasi	• Belum tersusunnya kebijakan system kerja baru pasca PB • *Mindset* aparatur belum siap mengantisipasi system kerja baru pasca PB • Belum tersedianya kebijakan pusat terkait manajeman kepegawaian daerah terkait pejabat fungsional

			hasil penyetaraan jabatan
7	Penataan kelembagaan/ organisasi	• Belum optimalnya pelaksanaan penataan kelembagaan menyesuaikan terbitnya nomenklatur program • Rendahnya kematangan organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Jember	1. Terbitnya Kepmendagri No. 050 -5889 Th 2021 yang merupakan pemuktahiran dari Permendari No 90 Th 2019 mengatur perubahan nomenklatur program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga masih terdapat nomenklatur PD saat ini yang tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 050 -5889 Th 2021 namun juga tidak bertentangan dg PP 18 tahun 2016 2. Pengendalian internal belum dilaksanakan di tingkat PD 3. Belum dilakukannya evaluasi kelembagaan dalam rangka menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten
Permasalahan Pelayanan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan			
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**

1	Pelayanan sebagai juru bicara pemerintah daerah	Kurangnya optimalnya pelaksanaan tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah	1. Kurangnya kompetensi SDM di bidang komunikasi atau juru bicara.atau kehumasan 2. Adanya *overlapping* tugas Bagian Prokopim sebagai juru bicara pemerintah daerah dengan DISKOMINFO
2.	Pelayanan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wabub	Pelayanan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wabub belum maksimal.	1. Kurangnya pendidikan dan latihan dibidang keprotokolan. 2. Jumlah SDM untuk protokol masih kurang
3.	Pelayanan pembuatan naskah sambutan	Naskah sambutan monoton, perlu variasi dan lebih tajam dalam mengangkat temaacara	Perlunya meningkatkan jumlah dan kemampuan SDM dalam penyusunan naskah sambutan.
4.	Pelayanan peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Pelayanan peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum maksimal.	• Kurangnya kompetensi petugas peliputan kegiatan Bupati dan Wabup • Kurangnya Jumlah petugas peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati untuk meng*handle* peningkatan kegiatan bupati/wabup

5.	Pelaksanaan fungsi keprotokolan sebagai resepsionis di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember	Kurangnya tenaga keprotokolan untuk melaksanakan tugas sebagai resepsionis.	• Belum ada system pemantauan / pencatatan jumlah dan kepentingan tamu di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember
Permasalahan Pelayanan Bagian Umum			
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**
1.	Belum optimalnya pelayanan Bagian Umum	Kurangnya sarpras pendukung pelayanan	1. Kurangnya dukungan anggaran penyediaan asrama/mess pelajar asal Jember yang belajar di Jogjakarta, dan baru tersedia hanya untuk pelajar putra saja 2. Kurangnya dukungan anggaran revitalisasi bangunan wisda prajamukti dan per luasan lahan
	Permasalahan pembangunan Bagian Perekonomian dan SDA		
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**
1	Realisasi alokasi pupuk bersubsidi	Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam menginput e-RDKK
2	Pemasaran produk lokal UMKM	- Rendahnya omzet penjualan UMKM - Kurangnya minat masarakat	Kurangnya promosi dan pemasaran terhadap produk-produk lokal UMKM

		terhadap produk local UMKM	
3	Rendahnya realisasi pengembalian kredit dana bergulir UMKM dikarenakan kurangnya itikad dari debitur UMKM penerima Kredit Dana bergulir untuk mengangsur.		Debitur mengalami kebangkrutan dan ada yang sudah meninggal dunia sementara kredit dana bergulir adalah kredit tanpa asuransi.
4	Kinerja BUMD dan BLUD	Peningkatan kinerja BUMD dan BLUD belum sesuai target	1. Belum tersedia strategi / terobosan pencapaian target kinerja untuk mengantisipasi kondisi iklim yang sangat berpengaruh pada produk unggulan dan kondisi perekonomian yang tidak stabil 2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD.
5	Pengendalian Inflasi di Kabupaten Jember	Fluktuasi Inflasi	• Terganggunya aktifitas perekonomian karena pandemi covid seperti pembatasan jadwal operasi sektor bisnis dan besarnya tenaga kerja yang di PHK, daya beli menurun.

			• Belum optimalnya pelaksanaan program pengendalian inflasi
6	Pengendalian dan penanganan Cukai Ilegal	Masih maraknya peredaran cukai ilegal di Kabupaten Jember	1. Kurangnya informasi tentang keberadaan cukai ilegal. 2. Maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember. 3. Kurang Efektifnya Operasi bersama untuk memberantas cukai ilegal
Permasalahan Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan			
NO	**POKOK MASALAH**	**MASALAH**	**AKAR MASALAH**
1	Pelimpahan wewenang kepala daerah kepada camat	Skala kewenangan yang perlu di definisi ulang	Perubahan peraturan yang relevan dengan kewenangan
2	Penyusunan LPPD	Belum optimalnya Pengumpulan data untuk penyusunan LPPD	• Kualitas SDM, proses perencanaan, tata kelola organisasi • Kurangnya Literasi petugas penyusun LPPD • Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan target pembangunan dan SPM yang telah ditetapkan sesuai peraturan
3	Adanya ego sektoral	Release peta kartogafik yang	Standar *baseline* peta yang berbeda (peta

	penentuan peta dasar	berbeda sesuai kebutuhan kementerian teknis	berdasarkan kepentingan) belum one purpose map
4	Kondisi geografis dan kontur wilayah	Wilayah yang luas dan kontur yang beragam membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk melaksanakan kegiatan lapangan	Sumberdaya dan waktu, perlu usaha ekstra dalam pelaksanaan giat.
5	Kegiatan yang bersifat residual dan antisipatif	Perencanaan kegiatan tidak dapat diprediksi kebutuhan pada tataran perencanaan normative	Kebutuhan yang relatif berbeda dari perencanaan
6	Pemenuhan SDM dan Sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas	Sarana prasarana perlu pembaruan (*absolete*) dan Kurangnya jumlah pegawai pelaksana ideal di Bagian Tata Pemerintahan	• Kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan sarpras dimana Sarana prasarana (peralatan kerja) yang ada kurang memadai menghambat pelaksanaan kegiatan • Distribusi pegawai yang kurang ideal menyulitkan untuk membagi habis pekerjaan secara proporsional (tataran pelaksana

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

"WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun

kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan "solutif" masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten

Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini "marjinal" melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing*

business) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Sekretariat DaerahKabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 Tujuan ke 3 dan Sasaran ke X dari RPJMD

Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke-2		

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

		Faktor

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	• Belum semua PD menyusun Anjab sesuai pedoman • Pemanfaatan Anjab dalam manajemen kepegawaian belum optimal • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan belum menyeluruh pada semua jenis jabatan • Peningkatan kesejahteraan ASN belum berdampak pada peningkatan kinerja	• Belum maksimalnya komitmen dan pemahaman PD terhadap Anjab • Belum maksimalnya pemahaman PD terhadap terhadap penggunaan anjab, ABK evjab sebagai instrument pembinaan karir & peningkatan kesejahteraa	• Sudah adanya ketentuan perundangan pelaksanaan Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan & Evaluasi Jabatan • PD sudah menyusun anjab dan ABK di instansi masing2
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovativ	• Rendahnya indeks inovasi daerah	• Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam peningkatan indeks inovasi • Daya dukung	• Kurangnya publikasi kebijakan inovasi daerah • Kurangnya sinergi *stakeholder* dalam peningkatan indeks

		anggaran memadai • Adanya regulasi yang mendukung • Memiliki forum inkubasi inovasi (Forum Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten)	inovasi daerah • Kurangnya kebijakan *reward and punishment* untuk keberlanjutan inovasi daerah
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat da daerah	Belum optimalnya harmonisasi produk hukum dan pengelolaan JDIH	• Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam proses penataan peraturan perundang-undangan dan pembangunan produk hukum daerah. • Daya dukung anggaran memadai • Adanya regulasi yang	• Belum tersediany a alat (*tool*) yang efektif dan efisien dalam proses pembentukan produk hukum daerah • Terbatasny a jumlah dan kualitas SDM perancang peraturan per UU-an pada Bagian Hukum

		mendukung • Memiliki media informasi IT berupa jaringan dokumentasi dan informasi hokum (JDIH)	dan di Perangkat Daerah • Terjadinya kelambanan dalam pembentukan produk hukum daerah • Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah • Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal • Masih lambannya pengolaha

			n dan pelaporan data terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM pada PD
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan			

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Terwujudnya Kelembagaan Yang Sederhana, Responsif, Adaptif, dan Kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	• Perlu dilaksanakannya evaluasi kelembagaan dalam rangka pencapaian kinerja daerah • Belum optimalnya pelaksanaan integrasi pelayanan dan tata laksana pemerintahan berbasis elektronik	• Kurangnya partisipasi PD dalam penyampaian data indikator teknis kelembagaan • Kurangnya partisipasi PD terkait permaslahan tumpang tindih kewenangan dan tupoksi	• Fasilitasi pemerintah pusat dan Provinsi dalam persiapan pelaksanaan penataan dan pemetaan kelembagaan

		• Masih lemahnya pemahaman tupoksi sehingga hail koordinasi menjadi tidak maksimal	
Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegritas dan Sejahtera	• Belum semua PD menyusun Anjab sesuai pedoman • Pemanfaatan Anjab dalam manajemen kepegawaian belum optimal • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan belum menyeluruh pada semua jenis jabatan • Peningkatan kesejahteraan ASN belum berdampak pada peningkatan kinerja	• Belum maksimalnya komitmen dan pemahaman PD terhadap Anjab • Belum maksimalnya pemahaman PD terhadap terhadap penggunaan anjab, ABK evjab sebagai instrument pembinaan karir & peningkatan kesejahteraa	• Sudah adanya ketentuan perundangan pelaksanaan Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan & Evaluasi Jabatan • PD sudah menyusun anjab dan ABK di instansi masing2
Terwujudnya Instansi Pemerintah Yang Efektiv, Efisien dan Akuntabel	• Sistem evaluasi Implementasi SAKIP masih lemah dalam mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	• Belum ada ketentuan yang tegas tentang sanksi bagi yang tidak mlaksanakan	• Adanya forum penghargaan tingkat nasional bagi daerah yang baik

	• Lemahnya akuntabilitas kinerja penyelengaraan pemerintahan • Kurang maksimalnya fasilitasi implementasi SAKIP oleh Tim SAKIP Kabupaten • Belum terciptanya budaya kerja yang baik dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal	implementasi SAKIP sesuai pedoman • Partisipasi PD belum maksimal • Kurangnya pemahaman PD tentang Implementasi SAKIP sesuai pedoman	implementasi SAKIPnya
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima	• Sistem evaluasi pelayanan public masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan • Sebagian besar unit pelayanan belum menerapkan SP dan SOP yang jelas dan transparan • Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informatika dalam peningkatan pelayanan publik • Minimnya Inovasi Pelayanan Publik pada PD	• Partisipasi dan komitmen kepala PD pada peningkatan pelayanan public belum maksimal	• Komitmen KDH dan Wakil KDH terhadap pelayanan prima • Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik • Adanya forum penghargaan tingkat nasional dan internasional terhadap inovasi pelayanan public
Peningkatan efektivitas Reformasi	• *Mindset*/pola pikir/pemahaman Sebagian besar aparatur di Lingk Pemkab Jember	• Partisipasi dan komitmen kepala PD pada	• Komitmen KDH dan Wakil KDH terhadap RB

Birokrasi Nasional	terkait RB yang dipandang hanya merupakan tugas fungsi dan kegiatan PD tertentu. • Kurangnya sinergitas antara PD penanggung jawab 8 area perubahan RB • Masih lemahnya pemahaman PD pengampu 8 area perubahan RB dalam mengawal jalannya RB sesuai tusinya	peningkatan RB belum maksimal	• Tuntutan masyarakat terhadap Kinerja Birokrasi yang lebih baik • Adanya pelaksanaan evaluasi RB oleh KemenPAN RB

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

a. Salah satu Tujuan Renstra Biro Administrasi Pemerintahan dan OtonomiDaerah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif terbuka, partispatoris memperkuat demokrasi kewargaan untukmenghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan", yang diukur dengan indikator yakni :

- Meningkatnya prosentase rumusan rekomendasi dan kebijakan bidang pemerintahan , otonomi daerah dan kerjasama(%)
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka sasaran strategis Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah dan

Desa"

b. Salah satu Tujuan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel, Proporsional, Efektif dan Efisien Menuju Pelayanan Prima".

   Sasaran dari tujuan ini adalah:

   - Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
   - Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
   - Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima

c. Salah satu Tujuan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar"

   Sasaran dari tujuan ini adalah : "Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar"

   Tujuan kedua yaitu Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama, dimana salah satu sasaran dari tujuan ini adalah " Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan social melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan social"

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi (Renstra Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur)

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah dan Desa		• Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada Bagian Tapem setiap tahun; • Adanya struktur organisasi Bagian Tapem yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur • tersedia nya DM dan tenaga teknis yang mendu; kung pelaksanaan	• Keterbatasan alokasi anggaran SDM dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi organisasi • SOP pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan sesuai dengan bidang pelayanan tugas belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan • Sarana prasarana yang *absolete* (kuno) • Belum intensifnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

		tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang administrasi • Adanya target kinerja/ indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh Bagian Tapem • Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Administrasi Pemerintahan; • Adanya	pelaksanaa fungsi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. • Dukungan regulasi kebijakan pemerintah pusat yang kurang optimal dalam proses perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama. • Pergantian petugas penyusun LPPD yang relatif cepat di perangkat daerah sehingga membuat terputusnya regenerasi keilmuwan antara petugas lamadan

		referensi hukum normatif yang dijadikan acuan norma dalam melaksanakan tugas dan fungsi; • Semangat kolektifitas organisasi untuk selalu dapat menghasilkan output pekerjaan yang terstandarisasi	petugas baru.
Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran		• Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan	• Kurangnya kesiapan PD dan *mindset* aparatur dalam mengantisipasi perubahan system kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi

		• Daya dukung anggaran memadai • Sarana prasarana memadai	• Kurangnya kesesuaian nomenklatur dan tupoksi bidang dengan Terbitnya Kepmendagri 050-5889 th. 2021
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja		• Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan • Daya dukung anggaran memadai • Sarana prasarana memadai	• Kurang solidnya PD Utama Pengampu kebijakan SAKIP • Kurangnya *awareness* aparatur dalam penerapan budaya kinerja dan *Core Values* BerAKHLAK
Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju		• Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam	• Belum dilaksanakannya evaluasi peta proses bisnis pasca

pelayanan prima		pengembangan SPBE • Daya dukung anggaran memadai • Adanya kebijakan Keterbukaan Informasi publik	penyederhanaan birokrasi • Belum menyeluruhnya pemahaman terhadap kebijakan ketatalaksanaan yang efektiv dan efisien • Belum tuntasnya pengintegrasian system informasi pelayanan publik
Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar		• Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiatan • Daya dukung anggaran memada • Sarana prasaran	• SDM yang belum memadai • Kurangnya sinergi antar stakeholder dalam membangun kondusivitas antar umat beragama

		a memadai	
Terlaksananya pelayanan administrasi kesejahteraan social melalui dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan social		• Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan agenda program dan kegiata • Daya dukung anggaran memadai • Sarana prasarana memadai	• SDM verifikator yang belum memadai • Validitas data penerima bantuan social • Kurangnya system pengendalian penyaluran bantuan sosial

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung perbaikan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur

Apabila diperhatikan sasaran umum Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah.Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sistim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK.Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri

atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energi, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya.Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung,kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemenfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan.Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan- ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatanruang yang sesuai dengan peruntukannya

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampake dan/atau resiko lingkungan hidup. Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

1) Secara selektif tidak semua indikator SDG's dalam KLHS yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember dapat di formulasikan dalam bentuk dokumen perencanaan OPD sesuai dengan

bidang tugas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi analisa terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

2) Bahwa dalam analisis KLHS pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki 4 pilar utama yaitu : a). Pilar ekonomi.b) pilar social.c). pilar lingkungan dan d). pilar hukum dan tata kelola. Secara selektif berdasarkan analisa integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dikerucutkan sesuai tugas dan fungsi kepada pilar hukum dan tata kelola.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan. Sedangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak berimplikasi secara langsung kepada kebijakan atau program yang dilakukan oleh 7 (tujuh) Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Namun Demikian khususnya pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat disampaikan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditinjau dari impikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

. **Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat**
Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Bagian Perekonomian dan SDA	• Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian (alokasi pupuk bersubsidi, pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM, pengendalian inflasi, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, peningkatan produk lokal UMKM) • Terjalinnya Kemitraan yang baik dengan *stakeholde*r terkait; • Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada Bagian	• Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kualifikasi dan kompentensi di bidang Perekonomian untuk mengolah dan menganalisa data sebagai bahan kebijakan pimpinan; • Masih terdapat permasalahan pengumpulan data dikarenakan masih banyak Perangkat Daerah yang kurang responsif terhadap data yang diminta • Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarpras • Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan belum

		Perekonomian dan SDA setiap tahun; • Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD	dipahami oleh pelaksana layanan. • Kualifikasi teknis yang dibutuhkan, serta beban kerja belum sebanding dengan ketersediaan personil unit pelayanan pada Bagian Perekonomian dan SDA; • Adanya penjabaran yang kurang sesuai terkait tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan SDA

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- Harmonisasi produk hukum
- Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan aparatur pemerintah
- Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk hukum daerah
- Meningkatnya peran dan kualitas fungsi kehumasan keprotokolan kepala daerah / wakil kepala daerah
- Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan
- pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan pengelolaan pengadaan barang / jasa pemerintah
- Realisasi Alokasi Pupuk Bersubsidi
- Peningkatan realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM
- Peningkatan Kinerja BUMD dan BLUD
- Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember
- Peredaran Cukai Ilegal
- Peningkatan kualitas LPPD
- Optimalisasi kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- Peningkatan kerjasama daerah baik kerjasama dengan daerah lainnya atau dengan pihak ketiga untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di kabupaten Jember
- Peningkatan kematangan organisasi perangkat daerah yang disebabkan Kurang optimalnya strategi pembinaan dan evaluasi kelembagaan dan kematangan organisasi perangkat daerah
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan Analisis Jabatan
- Peningkatan kualitas pelayanan public dan penerapan tata laksana
- Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah termasuk dalam Perangkat Daerah Pengampu Misi ke-2 yakni **.....*)**.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	92%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel	Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%	92%	94%	96%	100 %	100 %
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	95%	97%	97%	98%	98%	98%
		Meningkatnya prestasi Kabupaten Jember pada kompetisi	Prosentase ketercapaian prestasi meningkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		berbasis religi							
	BAGIAN HUKUM : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan		Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	90%	93%	95%	96%	97%	97,5 %
		Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100 %	673	675	676	678	680
		Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum	Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	100 %	113	114	115	116	117

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase jumlah produk hukum yang sudah diupload di JDIH	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat	100 %	600	610	615	620	625
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			dengan Realisasi Minimal 90%						
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan sinergitas bagi seluruh elemen perekonomian dan pembangunan daerah	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		peraturan perundang-undangan yang berlaku							
	Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja		Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Kabupaten/Kota						
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA : Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan Pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan pengelolaan pengadaan		Indikator Tujuan : Meningkatnya tertib administrasi pembangunan Indikator	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	barang / jasa pemerintah								
		Sasaran 1.1 Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	% Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sasaran 1.2 Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	% Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	BAGIAN UMUM: Terwujudnya pelayanan prima kepada Bupati, Wakil		Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Reformasi Birokrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli								
		Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	BAGIAN ORGANISASI: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel , Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima		Indeks Pelayanan Publik	2.75 (C)	3.00 (C)	3.25 (B-)	3.50 (B-)	3.75 (B)	4.01 (A-)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Nilai SAKIP Kabupaten Jember	69.00 (B)	70.47 (BB)	73.47 (BB)	77.26 (BB)	80.12 (A)	80.56 (A)
		Terwujudnya pelayanan publik yang prima yang didukung oleh tata laksana organisasi yang efektif dan efisien	% UPP yang menindaklanjuti hasil pemantauan kepatuhan standar pelayanan publik	40%	50%	75%	75%	75%	75%
			% PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik	40%	50%	50%	50%	50%	50%
			% PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai pedoman	40%	50%	75%	75%	75%	75%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	% Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik	50%	75%	75%	75%	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah dan Penerapan Analisis Jabatan	% Hasil Monev Kelembagaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			% kompetensi jabatan sesuai pedoman	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			% dokumen anjab/ ABK sesuai pedoman	75%	75%	100 %	100 %	100 %	100 %
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN : Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol	Prosentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		dan komunikasi pimpinan daerah							
			Prosentase kepuasan pimpinan paerah terhadap pelayanan keprotokolan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pimpinan dareah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SETELAH PERUBAHAN									
	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		**Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**			**98,29%**	**98,31%**	**98,37%**	**98,46%**
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudk	**Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi**			**93%**	**95%**	**96%**	**97%**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		an Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel							
		Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama			95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi			100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan, serta PBJ			100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP			73,47 (BB)	77,26 (BB)	80,12 (A)	80,56 (A)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik			3,25 (B-)	3,50 (B-)	3,75 (B)	4,51 (A-)

Gambar 4.1 *Logical Framework* Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

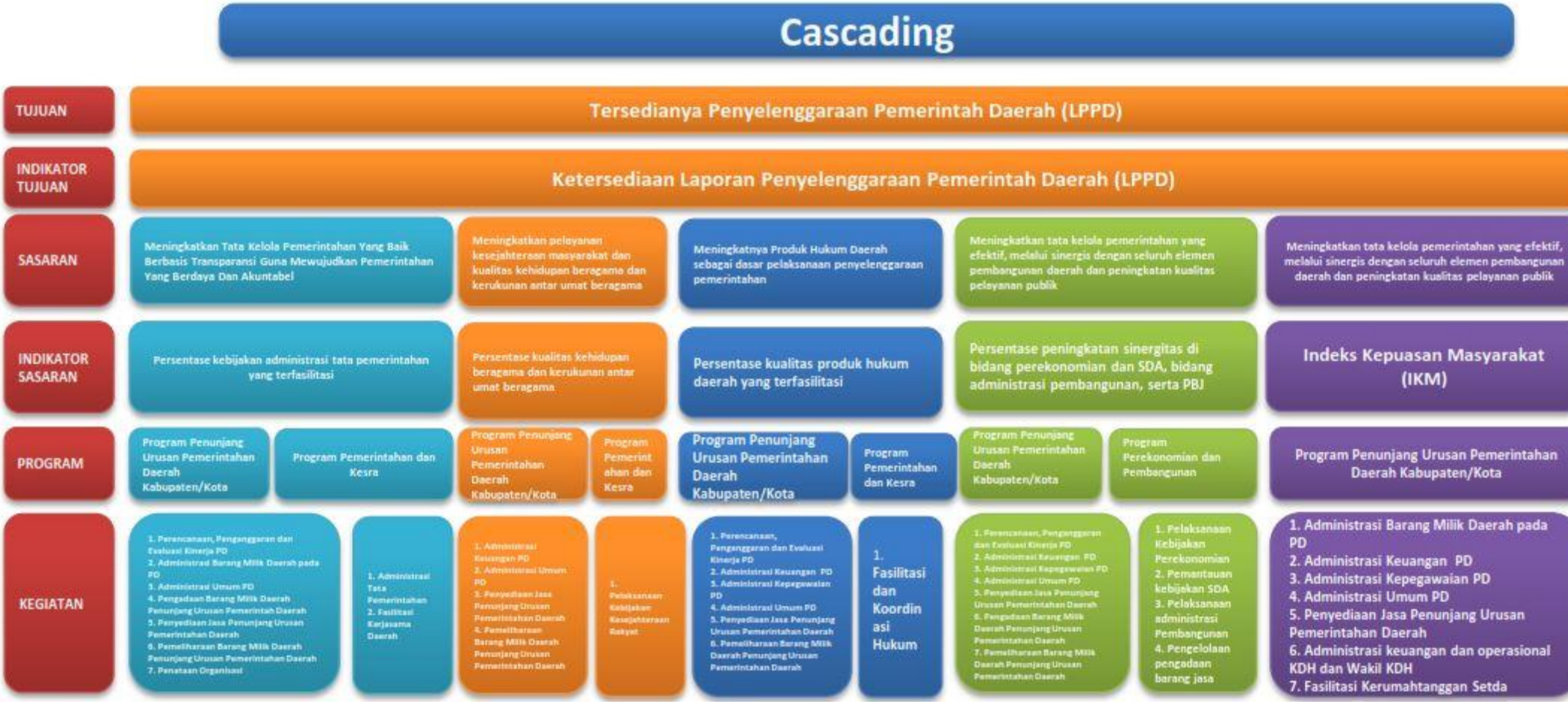

Cascading

TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
INDIKATOR TUJUAN	Nilai SAKIP
SASARAN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pelayanan Publik
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD 2. Administrasi Keuangan PD 3. Administrasi Umum PD 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penataan Organisasi 8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Gambar 4.2 *Cascading* Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

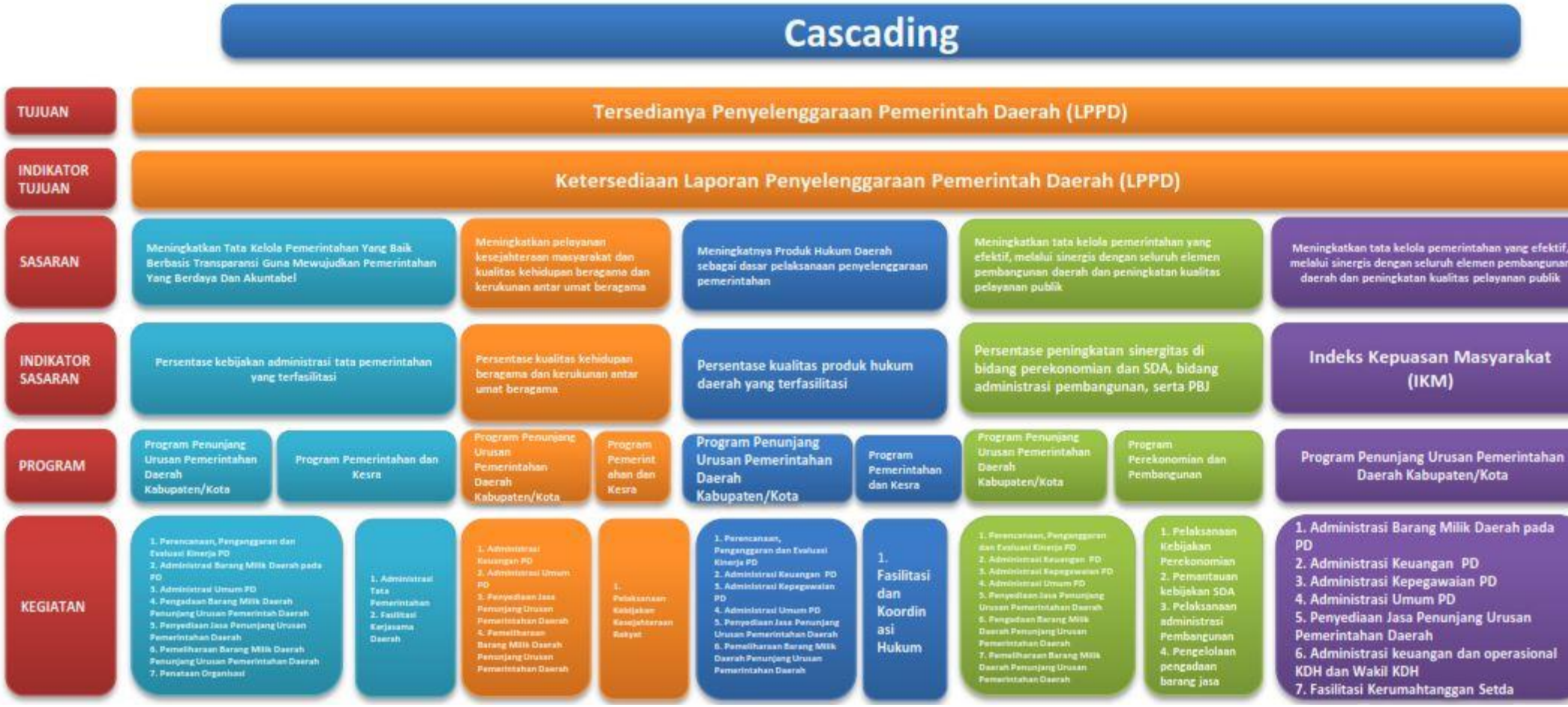

Cascading

TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
INDIKATOR TUJUAN	Nilai SAKIP
SASARAN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pelayanan Publik
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD 2. Administrasi Keuangan PD 3. Administrasi Umum PD 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penataan Organisasi 8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: "WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"			
MISI II: " Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Bagian Tata Pemerintahan: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lppd)		Memfasilitasi Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menyediakan Kebutuhan Kajian Dalam Rangka Pembangunan Jember
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan Yang Mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kerja Sama Daerah Guna Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi Pemerintahan Dan Kebutuhan Kerjasama Daerah Yang Disertai Dengan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan (Pelaksanaan Bimtek)
Bagian Kesejahteraan Rakyat: Meningkatnya Peran Tempat Ibadah Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Pondok-Pondok Pesantren, Masjid, Mushola, Tpq)	Sosialisasi Proses Pengajuan Bantuan Hibah Tempat Ibadah (Pondok-Pondok Pesantren, Masjid, Mushola, Tpq)	Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring, & Evaluasi Di Bidang Sarana Prasarana Pendidikan Agama, Dan Pembinaan Kehidupan Beragama Di Tempat Ibadah (Pondok-Pondok Pesantren, Masjid, Mushola, Tpq) Serta Peningkatan Fasilitasi Layanan Administrasi Dalam Penyaluran Bantuan Hibah Kepada Pondok Pesantren

Meningkatnya Kuantitas Dan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Penyuluh Agama	Meningkatnya Kuantitas Tenaga Pendidikan Nor Formal	Memberikan Apresiasi Kepada Masyarakat Yang Memiliki Kemampuan Mengajar Kitab Suci Baik Muslim & Non Muslim (Guru Ngaji) Dan Modin Nikah	Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Para Pengajar Al Qur'an Maupun Kitab Suci Agama Lain
Meningkatnya Peran Seni Dan Budaya Lokal Bernuansa Religi	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Muslim	Melaksanakan Dan Mensosialisasikan Kegiatan – Kegiatan Keagamaan Yang Bersifat Peringatan Hari Besar Islam Maupun Kegiatan Kegamaan Dimasyarakat Muslim	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Dan Kegiatan Di Masyarakat Muslim (Kkm) Sebagai Upaya Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan
Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Jember Dengan Lembaga Keagamaan"	Meningkatnya Prestasi Kabupaten Jember Pada Festival Religi Jawa Timur	Mengakomodir Dan Memfasilitas Bakat Minat Generasi Muda Dalam Pengembangan Baca Tulis Al Qur'an (Mtq & Mqk)	Terlaksananya Program Dan Kegiatan Untuk Peningkatan Nilai Budaya Yang Bersifat Perlombaan Bagi Antar Generasi Sehingga Akan Terwujud Masyarakat Muslim Yang Cinta Dan Mengamalkan Ajaran-Ajaran Al Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Masyarakat Qur'ani)
Bagian Hukum : Terciptanya Situasi Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tertib,Nyaman Dan Berkeadilan		Meningkatkan Jumlah Produk Hukum, Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Produk Hukum Yang Terupload	Melakukan Pelatihan Legal Drafting Untuk Meningkatkan Pemahaman Dalam Penyusunan Perundang-Undangan Serta Menggandeng Pihak Jpn Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan	Mewujudkan Produk Hukum Yang Berkualitas Dan Tepat Sasaran	Peningkatan Usulan Perda Dari Dprd Dilihat Dari Keperluan Masyarakat; Peningkatan

	Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Jumlah Fasilitasi; Penyusunan Kebijakan Dalam Membuat Produk Hukum; Meningkatkan Pelayanan Dalam Memfasilitasi Produk Hukum.
	Meningkatnya Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Mendorong Dan Meningkatkan Desa/Kelurahan Serta Masyarakat Yang Sadar Hukum	Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk Di Masing-Masing Wilayah; Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum; Peningkatan Kepuasan Dalam Bantuan Hukum Litigasi Dan Litigasi Yang Telah Dilayani.
	Persentase Jumlah Produk Hukum Yang Sudah Diupload Di Jdih	Meningkatkan Pengetahuan Serta Pemahaman Masyarakat Akan Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Ter Updatenya Dokumentasi Produk Hukum Daerah; Mempermudah Masyarakat Dalam Mengakses Dokumentasi Produk Hukum Daerah.
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam: Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah Dan		Berkoordinasi Dengan Stakeholder Dan Mensosialisasikan Peraturan-Peraturan Terkait	Monitoring Dan Evaluasi Berkala Atas Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Terkait

Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak			
	Meningkatnya Kontribusi Pdrb Kategori Pertanian	Meningkatkan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pertanian	Mengintegrasikan Kegiatan Hulu (On-Farm) Dengan Kegiatan Hilir (Off-Farm) Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian Dan Perikanan Sehingga Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dan Nelayan Yang Ditunjukkan Dengan Nilai Tukar Petani (Ntp) Dan Nilai Tukar Nelayan (Ntn) Yang Lebih Tinggi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergis Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Memfasilitasi Koordinasi Pengendalian Inflasi Dan Ketersediaan Bahan Pokok Di Kabupaten Jember	Malakukan Koodinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Dan Ketersediaan Bahan Pokok Di Kabupaten Jember
	Meningkatkan Sinergitas Bagi Seluruh Elemen Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Layanan Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Keindahan Lingkungan	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Keindahan Lingkungan	Menjaga Ketersediaan Bahan-Bahan Pokok Dengan Harga Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Mendorong Dan Memfasilitasi Perangkat Daerah Dalam Penerapan Manajemen Resiko Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Untuk Mencegah Kesalahan Dan/Atau Penyalahgunaan Prosedur	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Meningkatkan Investasi Dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal Yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja		Memfasilitasi Koordinasi BUMD Dan UMKM Baik Dengan Eksekutif Maupun Legislatif	Melaksanakan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pada BUMD Dan UMKM
	Meningkatnya Investor Berskala Nasional (Pmdn/Pma)	Merevitalisasi Atau Membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Baru	Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Kompetitif Melalui Kemudahan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Dengan Tetap Mengutamakan Keterlibatan Usaha Kecil, Mikro Dan Koperasi; Kemampuan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal; Serta Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Usaha Mikro	Memfasilitasi Lahirnya Wirausaha Baru Dan Bertumbuhkembangnya Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Potensi Lokal, Seperti Pertanian Dan Perikanan, Terutama Di Pesantren-Pesantren	Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Kompetitif Melalui Kemudahan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Dengan Tetap Mengutamakan Keterlibatan Usaha Kecil,

		Melalui Strategi Wes Wayahe Pesantren Berdaya	Mikro Dan Koperasi; Kemampuan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal; Serta Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
Bagian Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang Dan Jasa : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Tertib Pengelolaan Dan Pelaksanaan Apbd Dan Pengendalian Pembangunan Serta Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah		Meningkatkan Tertib Pengelolaan Dan Pelaksanaan Apbd, Pengendalian Pembangunan, Serta Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	1. Efektivitas Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Apbd Dan Pengendalian Pengelolaan Apbd 2. Efektivitas Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Pengendalian Dalam Penerapan Kebijakan
	Sasaran 1.1 Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Apbd	1. Meningkatkan Efektivitas Dan Kinerja Melalui Peningkatan Penatalaksanaan, Tata Kelola Administrasi Perencanaan Dan Monitoring Pengendalian Pembangunan.	1. Optimalisasi Dan Implementasi Petunjuk Teknis, Prosedur & Mekanisme Pelaksanaan Apbd. 2. Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Apbd Opd (Laporan Fisik, Non Fisik & Keuangan) Melalui Aplikasi Tepra Lkpp.
	Sasaran 1.2 Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	2. Melakukan Intens Pelaksanaan Terhadap	1. Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa

	Pemerintah Secara Elektronik	Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.	Pemerintah Secara Elektronik. 2. Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendampingan, Konsultansi Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 3. Optimalisasi Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Bagian Umum: Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Dan Staf Ahli		Memfasilitasi Kebutuhan Dan Semua Kegiatan Pimpinan	Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pimpinan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Dan Staf Ahli	Memfasilitasi Kebutuhan Dan Semua Kegiatan Pimpinan	Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pimpinan
Bagian Organisasi: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel , Efektif Dan Efisien, Dan Pelayanan Publik Yang Prima		Mefasilitasi Perumusan Kebijakan Dan Mendorong Komitmen Pimpinan Dalam Penerapan Reformasi Birokrasi	Perumusan Kebijakan Dan Mendorong Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja, Pemanfaatan Anjab
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Oleh Tata Laksana Organisasi Yang Efektif Dan Efisien	Mewujudkan Pelayanan Public Yang Prima Sesuai Tuntutan Dan Kebutuhan Masyarakat	1) Meningkatkan Kepatuhan Upp Terhadap Uu No 25 Tahun 2009 2) Meningkatka Inovasi Pelayanan Upp

			3) Penerapan Tata Laksana Pelayanan Sesuai Pedoman
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Membangun Budaya Kinerja Aparatur Dan Mewujudkan *Performance Based Budgeting*	1) Meningkatkan Komitmen Pd Pengampu Kebijakan Untuk Penerapan Sakip Sesuai Pedoman 2) Membangun Budaya Kinerja Aparatur
	Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah Dan Penerapan Analisis Jabatan	Membangun Kelembagaan Pd Yang Efektif, Efisien Dan Standar Kualitas Sdm Aparatur	1) Mewujudkan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah Dan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah 2) Meningkatkan Kualitas Penyusunan Analisis Jabatan Dan Standar Kompetensi Jabatan
Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan: Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan			
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Meningkatkan Pelayanan Keprotokolan, Serta Komunikasi, Dan Dokumentasi Pimpinan Yang Lebihi Profesional	1. Mengembangkan Sistem Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi, Dan Dokumentasi Pimpinan Yang Profesional Dan Berkualitas
			2. Mengembangkan Dan Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Protokol, Komunikasi, Dokumentasi Pimpinan Yang Profesional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Subbag Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SEBELUM PERUBAHAN																			
BAGIAN TAPEM Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah				Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	90%	92%	2,817,246,275.00	98,23%	2.686.417.220,00							99,54%	3.814.551.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

Daerah (LPPD)																			
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel			Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%	90%		92%								98%	3.814.551.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAER	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang	60%	70%	1,245,623,775.00	78%	1,579,035,720.00							98%	1.650.339.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			AH KABUPATEN /KOTA	terpenuhi															
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan evaluasi kinerja OPD	100%	100 %	97,614,500.00	100 %	42,637,980							100 %	42.637.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.000							2 dokumen	4.126.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200							1 dokumen	4.5 60. 200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200							1 dokumen	4.5 60. 200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200							1 dokumen	4.5 60. 200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200							1 dokumen	4.5 60. 200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan PD	100%	100 %	413,780,075.00	100 %	413,780,075.00							100 %	413,780,075.00	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	413,780,075.00	12 dokumen	413,780,075.00							12 dokumen	413,780,075.00	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada PD	100%	100 %	7.100.000	100 %	7.100.000							100 %	7.100.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000							2 dokumen	3.420.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	3.680.000	1 laporan	3.680.000							1 laporan	3.680.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	100%	100 %	492.620.000	100 %	492.620.000							100 %	492.620.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	103.448.000	5 paket	103.448.000							5 paket	103.448.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	2 laporan	62.880.000	2 laporan	62.880.000							2 laporan	62.880.000		
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	320.600.000	12 laporan	320.600.000							12 laporan	320.600.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penun	Persentase terpenuhinya pengadaan barang	100%	100 %	163.680.000	100 %	163.680.000							100 %	163.680.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			jang Urusan Pemerintah Daerah	milik daerah sesuai kebutuhan PD															
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang daerah yang terpelihara	90%	100 %	79.117.000	100 %	79.117.000							100 %	79.117.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Peroangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	7 unit	55.010.000	7 unit	55.010.000							7 unit	55.010.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai LPPD daerah melalui penyelesaian EKPPD,jumlah OPD Menyusun data pendukung LPPD sesuai pedoman	90%	95%	196,647,500.00	100 %	172.220.000.00							100 %	254.840.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	90%	95%	196,647,50	100 %	172.220.0							100 %	254.84	Bag. Tapem	Kabupaten

			Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			0.00		00.00								0.000		Jember
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terpenuhinya fasilitasi, komunikasi pimpinan	57,50%	60%	45,217,000.00	0%	0							99%	107.974.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	84,15%	96%	1,571,622,500.00	98%	1,107,381,500.00							99,33%	2.164.212.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
				Persentase dukungan														Bag. Tapem	Kabupaten

				terhadap fungsi kewilayahan															Jember
				Peningkatan presentase inventarisasi, penegasan rupa bumi, dan batas wilayah														Bag. Tapem	Kabupaten Jember
				Peningkatan Kerjasama daerah														Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan	93,30%	95%	722.620.000	95%	738.940.000							98,70%	1.365.652.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.02.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	156.300.000	2 dokumen	161.530.000							98,50%	523.780.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.02.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	289.400.000	2 dokumen	294.680.000							99,21%	726.450.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen	3 dokumen	276.920.000	2 dokumen	282.730.000							98,46%	981.320.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama	Persentase kesepakatan dan perjanjian	75%	97%	155.680.	100 %	158.450.000							100 %	798.560.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			Daerah	kerjasama yang ditindaklanjuti			000												
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50 dokumen	50 dokumen	63.270.000	50 dokumen	64.180.000							50 dokumen	64.180.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	1 dokumen	80.950.000	1 dokumen	82.490.000							1 dokumen	82.490.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : Meningkatkan kualitas kehidu				Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat	100%	95%	29.025.099.700	97%	27.121.019.570							95%	136.900.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

pan beragama dan kerukunan antar umat beragama				beragama															
	Meningkatnya prestasi Kabupaten Jember pada kompetisi berbasis religi			Prosentase ketercapaian prestasi meningkat		100 %		100 %								100 %		Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU	Prosentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang	90%	90%	1.303.977.600	95%	1.399.020.620							90%	10.400.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			PATEN /KOTA	tercukup i															
		4.01.01. 2.02	Admin istrasi Keuan gan Peran gkat Daera h	Prosenta se tertib laporan akuntabi litas kinerja pemerin tah	90%	90%	26 6.1 60. 00 0	100 %	515 .33 4.0 00							100 %	2.5 00. 000 .00 0	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.02.02	Penye diaan Admin istrasi Pelaks anaan Tugas ASN	Jumlah Dokume n Hasil Penyedi aan Admini strasi Pelaksan an Tugas ASN	90%	100 %	26 6.1 60. 00 0	12 Lapo ran	515 .33 4.0 00							60 Lapo ran	2.5 00. 000 .00 0	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 20.6	Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h	Prosenta se pemenu han kebutuh an dan pemelih araan sarana prasaran a kantor	80%	80%	95 3.1 32. 10 0	90%	734 .05 4.4 20							85%	3.7 25. 000 .00 0	Bagian Kesra	Kab upat en Jem ber

		4.01.01.2.06.02	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	80%	80%	206.446.900	2 Paket	27.547.850							10 Paket	500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	80%	80%	250.659.000	12 Paket	234.129.690							60 Paket	1.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	80%	80%	17.549.200	1 Paket	35.583.280							5 Paket	100.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordi	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat	80%	80%	478.477.	12 Laporan	436.793.600							60 Laporan	2.125.000	Bagian Kesra	Kabupaten

			nasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			000										.000		Jember
		4.01.01.20.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	100%	100 %	31.340.000	100 %	52.100.000							100 %	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100 %	18.140.000	12 Laporan	38.900.000							60 Laporan	100.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	100%	100 %	13.20	12 Laporan	13.200.000							60 Laporan	50.000	Bagian Kesra	Kabupaten

			Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik			0.000										.000		Jember
		4.01.01.20.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	75%	75%	53.345.500	100 %	97.532.200							85%	300.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.02.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Peroangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	75%	75%	20.252.000	8 Kendaraan	47.532.200							40 Kendaraan	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan pajaknya															
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75%	75%	33.093.500	15 Peralatan	50.000.000							75 Peralatan	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase hasil kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan dasar,	100%	100 %	25.754.805.500	100 %	25.721.998.950							100 %	126.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

				permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual, kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama															
		4.01.02.20.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase meningkatnya kualitas Sarana Prasarana di pondok pesantren, jumlah guru ngaji dan penyulu	100%	100 %	24.107.668.300	100 %	24.087.492.280							100 %	120.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

				h agama dan kegiatan keagamaan yang terselenggara															
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100%	100 %	2.10 2.76 3.3 00	16 Dokumen	3.452.428.740							80 Dokumen	12.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial meliputi Belanja Alat/ Bahan	100%	100 %	20.711.665.000	4 Dokumen	19.220.820.000							20 Dokumen	100.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

				untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Jasa, Tenaga Administrasi, Belanja bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu (guru ngaji)															
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyara	100%	100 %	1.293.240.000	3 Dokumen	1.414.243.540							15 Dokumen	7.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			n Masyarakat	kat meliputi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan														

				Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan Meningkatnya Jumlah Guru Ngaji dan Penyuluh Agama															

		4.01.02.20.4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah event lomba religi yang diikuti/dilaksanakan	100%	100%	1.647.137.200	100%	1.634.506.670							100%	6.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%	1.647.137.200	6 Dokumen	1.634.506.670							30 Dokumen	8.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
BAGIAN HUKUM : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan				Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	100%	90%	3.272.960.800,00	93%	3.600.780.552,00							94%	2.869.312.410,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

berkeadilan																			
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan			Prosentase peningkatan produk hukum daerah		100 %		100 %								100		Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukupi	100%	100 %	1.321.859.800,00	100 %	1.212.330.552,00							100 %	939.357.660,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan evaluasi kinerja OPD (RKA, DPA, RKAP, DPPA)	100%	100 %	42.688.000,00	100 %	30.324.000,00							100 %	16.196.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 dokumen	7 dokumen	10.672.000,00	7 dokumen	7.581.000,00							7 dokumen	3.221.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	7 dokumen	7 dokumen	10.672.0	7 dokumen	7.581.							7 dokumen	6.449.	Bagian Hukum	Kabupaten

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			00,00		000,00								000,00		Jember
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 dokumen	7 dokumen	10.672.000,00	7 dokumen	7.581.000,00							7 dokumen	297.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordin	7 dokumen	7 dokumen	10.672.000,00	7 dokumen	7.581.000,00							7 dokumen	6.229.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			DPA-SKPD	asi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD															
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan, honor non ASN, ATK dan Lembur OPD	100%	100 %	627.299.300,00	100 %	782.432.052,00							100 %	599.818.415,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	12 laporan	627.299.300,00	12 laporan	782.432.052,00							12 laporan	599.818.415,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	100%	100 %	651.872.500,00	100 %	399.574.500,00						100 %	323.343.245,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor guna menunjang kebutuhan ASN	100%	100 %	431.450.000,00	0	-						0	-	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100 %	19.954.500,00	1 paket	13.256.500,00						1 paket	12.397.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah laporan penyelenggaraa	100%	100 %	200.468.	12 laporan	386.318.0						12 laporan	310.946.2	Bagian Hukum	Kabupaten

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			000,00		00,00							45,00		Jember
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase produk hukum yang terselesaikan, kasus dan bankum yang diselesaikan, produk hukum yang terpublikasi	100%	100%	1.951.101.000,00	100%	2.388.450.000,00							70%	1.929.954.750,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.05	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	100%	1.951.101.000,00	100%	2.388.450.000,00							70%	1.929.954.750,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100%	100 %	517.450.000,00	673 dokumen	466.800.000,00							650 dokumen	283.168.550,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
BAGIAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	58.271.100							60 Laporan	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

dan menguasai hajat hidup orang banyak																			
	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	58.271.100							60 Laporan	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUT	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	12 Laporan	12 Laporan	13 0.4 99. 50 0	12 Laporan	58.271.100							60 Laporan	300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			UHAN POKOK DAN BARANG PENTING	dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%															
		3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	13 0.4 99. 50 0	12 Laporan	58. 271 .10 0							60 Laporan	300 .00 0.0 00	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggun	12 Laporan	12 Laporan	13 0.4 99. 50 0	12 Laporan	58. 271 .10 0							60 Laporan	300 .00 0.0 00	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	aan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%															
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan sinergitas bagi seluruh elemen perekonomian dan pembangunan daerah			Prosentase terlaksanya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100%	100 %		100 %								100 %	2.400.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

	Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan			Prosentase terlaksanaya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100%	100 %		100 %											
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%	100 %	407.567.000	78%	197.961.000							100 %	2.400.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaks	Prosentase Koordin	100%	100 %	407.5	100 %	169.04							100 %	2.400.	Bagian Perekonomia	Kabupaten

			anaan Kebijakan Perekonomian	asi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA			67.000		5.000								000.000	n dan SDA	Jember
		4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	407.567.000	12 Laporan	169.045.000							100 %	800.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber	Prosentase terlaksananya pemantauan kebijakan Sumber	100%	100 %	413.780.075	100 %	28.916.000							60 Laporan	800.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			Daya Alam	Daya Alam															
		4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	100%	100 %	413.780.075	0%	4.983.000							100 %	1.600.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebija	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkrosisasi dan evaluasi kebijakan	0%	0%	-	100 %	28.916.000							100 %	500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			kan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	pertambangan dan lingkungan hidup															
		4.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Prosentase terlaksanya koordinasi, sinkrosisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	0%	0%	-	0%	-							100 %	600.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai			Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%	100 %		100 %								100 %	2.490.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

	peraturan perundang-undangan yang berlaku																		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%	100 %	278.469.000	100 %	274.918.200							100 %	2.490.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerj	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%	100 %	11.188.500	100 %	6.732.000							100 %	55.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			a Perangkat Daerah																
		4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	9.030.000	6 Laporan	5.358.800							30 Laporan	40.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.06	Sub KegiatanKoordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Laporan	6 Laporan	2.158.500	6 Laporan	1.373.200							30 Laporan	15.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			r Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	12 Dokumen	12 Dokumen	207.869.000	12 Dokumen	218.886.700							60 Dokumen	1.500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	207.869.000	12 Dokumen	218.886.700							60 Dokumen	1.500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	1 paket	1 paket	5.000.000	0	1.336.500							8 paket	55.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	0	-	0	-							3 paket	30.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	1.336.500							5 paket	25.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0%	0%	-	0%	-							3 paket	500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0%	0%	-	0%	-							3 paket	500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penun	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuh	100%	100 %	14.221.500	100 %	12.357.000							100 %	80.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			jang Urusan Pemerintahan Daerah	an dasar PD															
		4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	14.221.500	12 laporan	12.357.000							12 Laporan	80.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%	100 %	40.190.000	100 %	35.606.000							100 %	200.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			Daerah																
		4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	19.680.000	1 Unit	19.000.000							1 unit	100.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	20 Unit	20 Unit	20.510.000	20 Unit	16.606.000							20 unit	100.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			Peralatan dan Mesin Lainnya	Dipelihara															
Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja				Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%	100 %	1.647.690.500	100 %	1.893.173.200							100 %	1.900.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
	Meningkatnya investor berskala nasional			Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta	100%	100 %	1.647.690.500	100 %	1.893.173.200							100 %	1.900.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

	(PMDN /PMA)			Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA															
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%	100 %	395.305.000	100 %	260.534.200							100 %	1.900.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perek	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembina	100%	100 %	395.305.000	100 %	260.534.200							100 %	1.900.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			onomian	an Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA															
		4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen	395.305.000	12 Dokumen	212.136.200							60 Dokumen	1.000.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrosisasi,	0	0	-	0	-							12 Dokumen	500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD															
		4.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0	0	-	4 Dokumen	48.398.000							16 Dokumen	400.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
	Meningkatnya jumlah dan kualitas	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN	Jumlah UMKM yang Melaksanakan	100 UMKM	100 UMKM	1.227.14	100 UMKM	1.604.884							500 UMKM	10.000.00	Bagian Perekonomia	Kabupaten

	usaha mikro		DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			5.500		.000								0.000	n dan SDA	Jember
		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	100 UMKM	1.227.145.500	100 UMKM	1.604.884.000							500 UMKM	10.000.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promo	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi	100 UMKM	100 UMKM	1.227.14	100 UMKM	1.604.884							500 UMKM	10.000.00	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			si Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			5.500		.000							0.000		
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%	100 %	25.240.000	100 %	27.755.000							100 %	150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan	Prosentase Koordinasi,	100%	100 %	25.24	100 %	27.755							100 %	150.00	Bagian Perekonomia	Kabupaten

			Kebijakan Perekonomian	Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA			0.000		.000								0.000	n dan SDA	Jember
		4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perancanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Laporan	12 Laporan	25.240.000	12 Laporan	27.755.000							60 Laporan	150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN				Indikator Tujuan : Meningkatnya tertib administrasi pemban	100%	100 %		100 %								100 %	21.171.570.833	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

BARANG DAN JASA : Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan Pengendalian pembangunan serta peningkatan				gunan Indikator															

pelayanan pengelolaan pengadaan barang / jasa pemerintah																			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Kantor	100%	100 %	2.240.314.500	100 %	2.236.858.500							100 %	15.896.559.328	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	% Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasi	100%	100 %	905.183.000	100 %	1.165.878.000							100 %	8.022.984.778	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

			Daerah	lan/ Honorarium dan Laporan Keuangan															
				% Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik														Bag. AP dan PBJ	
				% Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD														Bag. AP dan PBJ	

				Indikator															
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	592.103.000	12 Bulan	851.318.000							100 %	5.789.484.522	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik, Non Fisik dan Anggaran OPD	72 OPD	72 OPD	313.080.000	72 OPD	314.560.000							100 %	2.233.500.256	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100 %	736.241.500	100 %	302.740.500							100 %	2.584.502.527	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	10 Paket	10 Paket	187.200.000	10 Paket	168.335.000							100 %	1.214.902.009	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	15 Paket	15 Paket	450.015.150	15 Paket	52.054.800							100 %	767.814.909	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	4 Paket	4 Paket	99.026.350	4 Paket	82.350.700							100 %	601.785.609	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemer	% Pemenuhan Jasa Pelayanan & Pemeliharaan Sarana	100%	100 %	399.230.000	100 %	575.880.000							100 %	3.915.034.988	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

			intahan Daerah	dan Prasarana Kantor															
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Horonarium / Gaji Tenaga Non ASN dan Mamin Kebutuhan Pegawai (12 Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	311.025.000	12 Bulan	486.775.000							100 %	3.282.835.053	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Biaya Telepon (12 Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	5.280.000	12 Bulan	5.280.000							100 %	37.514.928	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Materai dan Buku Cek Bank	12 Bulan	12 Bulan	2.925.000	12 Bulan	3.825.000							100 %	26.277.008	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Kerja	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000							100 %	568.408.000	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	% Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	100 %	63.610.000	100 %	70.410.000							100 %	493.470.091	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

			n Daera h																
		4.01.01. 2.09.01	Penye diaan Jasa Pemeli haraa n, Biaya Pemeli haraa n, dan Pajak Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabata n	Jumlah Kendara an Dinas Jabatan yang dipelihar a	1 Unit	1 Unit	20. 61 5.0 00	1 Unit	24. 865 .00 0							100 %	172 .41 8.3 12	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber
		4.01.01. 2.09.02	Penye diaan Jasa Pemeli haraa n, Biaya Pemeli	Jumlah Kendara an Dinas Operasi onal Kantor Yang	9 Unit	9 Unit	42. 99 5.0 00	9 Unit	45. 545 .00 0							100 %	321 .05 1.7 80	Bag. AP dan PBJ	Kab upat en Jem ber

			haraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipeliharа															
		4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas**	**100%**	**100 %**	**136.050.000**	**100 %**	**121.950.000**							100 %	880.566.945	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Terselenggaranya Bimtek Aparatur Negara	4 Paket	4 Paket	136.050.000	4 Paket	121.950.000							100 %	880.566.945	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

			Undangan																
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% Pemenuhan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa	100%	100 %	2.962.727.000	100 %	3.026.731.000							100 %	21.171.570.833	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	3 Buku	3 Buku	462.960.000	3 Buku	461.410.000							100 %	3.279.914.191	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember

		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3 (Tiga) Buku	3 Buku	3 Buku	462.960.000	3 Buku	461.410.000							100 %	3.279.914.191	Bag. AP dan PBJ	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	% Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan/ Honorarium Kelompok Kerja UKPBJ dan LPSE	100%	100 %	2.499.767.000	100 %	2.565.321.000							**100 %**	**17.891.656.642**	**Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE**	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium	12 Bulan	12 Bulan	1.853.463.000	12 Bulan	1.866.569.000							100 %	13.249.053.402	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

				UKPBJ - 12 Bulan														dan LPSE	
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terpenuhiya Pembayaran Honorarium LPSE - 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	646.304.000	12 Bulan	638.204.000							100 %	4.542.603.240	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	600 Orang	600 Orang	60.548.000	600 Orang	60.548.000							100 %	100.000.000	Kasubbag Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
BAGIAN UMUM : Terwujudnya pelayanan				Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan	100%	100 %		100 %								100 %	41.862.173.500	Bagian Umum	Kabupaten Jember

prima kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli				Indeks Reformasi Birokrasi															
	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli															100 %	41.862.173.500		Kabupaten Jember
		4.01.01	PROGRAM PENUNJAN	Prosentase Pemenuhan	100%	100 %	84.644.5	100 %	39.431.32							100 %	41.862.17	Bagian Umum	Kabupaten

			G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			06.580		3.393								3.500		Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100 %	21.549.686.008	100 %	19.404.637.393							100 %	17.507.267.787	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100 %	19.664.401.008	100 %	17.458.762.393							100 %	15.514.422.787	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Prosentase Penyediaan Administrasi	100%	100 %	1.885.28	100 %	1.945.875							100 %	1.992.845.000	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN			5.000		.000										
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100 %	97.500.000	100 %	115.500.000							100 %	17.526.314	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	100 %	97.500.000	100 %	115.500.000							100 %	17.526.314	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangk	90%	100 %	961.300.000	100 %	357.500.000							100 %	385.866.369	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Daerah	at Daerah															
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100 %	961.300.000	100 %	357.500.000							100 %	385.866.369	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	100 %	21.216.148.700	100 %	7.852.925.300							100 %	10.506.368.270	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangu	Prosentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100%	100 %	184.987.000	100 %	199.553.800							100 %	237.773.852	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			nan Kantor	Bangunan Kantor															
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100 %	5.589.348.000	100 %	573.957.200							100 %	8.946.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100 %	603.745.000	100 %	135.727.600							100 %	4.200.244.012	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100 %	2.286.495.500	100 %	1.852.163.200							100 %	229.251.970	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetaka	Prosentase Penyediaan Barang	100%	100 %	925.214.	100 %	244.10							100 %	-	Bagian Umum	Kabupaten

			n dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan			200		2.500										Jember
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	12.000.000	100%	6.000.000							100%	2.840.530.643	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	5.348.634.000	100%	2.002.510.000							100%	237.773.852	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul	Prosentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	100%	100%	6.265.725.000	100%	2.838.911.000							100%	2.781.733.937	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			tasi SKPD	Konsultasi SKPD														
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	14.354.432.432	100 %	5.672.123.900							100 %	6.488.560.304	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100 %	387.491.000	100 %	198.549.900							100 %	166.078.050	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100 %	2.717.987.160	100 %	2.431.440.000							100 %	2.515.991.704	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			dan Listrik																
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100 %	8.883.454.272	100 %	1.056.734.000							100 %	1.626.637.100	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100 %	2.365.500.000	100 %	1.985.400.000							100 %	2.179.853.450	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin	100%	100 %	3.619.740.500	100 %	3.452.210.000							100 %	4.630.162.835	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			intahan Daerah	tahan Daerah															
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100 %	1.204.920.500	100 %	954.250.000							100 %	954.435.243	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	100%	100 %	1.841.350.500	100 %	1.078.000.000							100 %	1.973.615.538	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase Pemeliharaan Mebel	100%	100 %	573.469.500	100 %	150.000.000							100 %	99.661.200	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Prosentase Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100 %		100 %	230.000.000							100 %	164.460.004	Bagian Umum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100 %		100 %	1.039.960.000							100 %	1.437.990.850	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100 %	2.272.200.160	100 %	1.765.075.000							100 %	1.250.971.221	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjang	100%	100 %	375.150.	100 %	207.021.225							100 %	174.299.721	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			160												
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100 %	772.050.000	100 %	456.000.000							100 %	117.030.000	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daera	Prosentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional	100%	100 %	1.125.000.000	100 %	1.102.053.775							100 %	959.641.500	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			h dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100 %	21.547.737.850	100 %	21.344.574.184							100 %	1.075.450.400	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Prosentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100%	100 %	974.885.500	100 %	424.713.300							100 %	618.543.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah	Prosentase Penyediaan Kebutuhan	100%	100 %	604.942.	100 %	386.638.500							100 %	456.907.100	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			Tangga Wakil Kepala Daerah	Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			000												
BAGIAN ORGANISASI: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel , Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima				Indeks Pelayanan Publik	tidak ada data	2.75 (C)	1.159.000.000	3.00 (C)	1.159.000.000							4,51 (A-)	5795000000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
				Nilai SAKIP Kabupaten Jember	61,60 (B)	69.00 (B)		70.47 (BB)								80,56 (A)		Bagian Organisasi	Kab. Jember

	Terwujudnya pelayanan publik yang prima yang didukung oleh tata laksana organisasi yang efektif dan efisien			% UPP yang meninda klanjuti hasil pemantauan kepatuhan standar pelayanan publik	25%	40%		50%								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember
				% PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik	2%	40%		50%								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember
				% PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai	25%	40%		50%								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember

				pedoman															
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			% Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik	45%	50%		75%								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember
	Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah dan Penerapan Analisis Jabatan			% Hasil Monev Kelembagaan yang ditindaklanjuti	100%	100 %		100 %								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember
				% kompetensi jabatan sesuai	25%	75%		100 %								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember

				pedoman															
				% dokumen anjab/ ABK sesuai pedoman	50%	75%		75%								100 %		Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	rata rata capaian fasilitasi penataan kelembagaan, yanblik, talak, akuntabilitas dan RB	38%	60%	1.159.000.000	70%	1.159.000.000							90%	5.975.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13.	Kegiatan Penataan Organisasi	1. % Hasil Monev Kelembagaan yang ditindaklanjuti 2. %	Kondisi 1: 100% Kondisi 2 : 25% Kondisi 3 : 50%	Target 1: 100 % Target 2 : 75% Target 3 :	820.000.000	Target 1: 100 % Target 2 : 100 % Targ	820.000.000							Target 1: 100 % Target 2 : 100 % Targ	4.100.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

				kompetensi jabatan sesuai pedoman 3. % dokumen anjab/ABK sesuai pedoman 4. % Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik 5. % UPP yang meninda klanjuti hasil pemantauan kepatuhan SPP 6. % PD yang melakukan Inovasi	Kondisi 4 : 45% Kondisi 5 : 25% Kondisi 6 : 2% Kondisi 7 : 25%	75% target 4 : 50% target 5 : 40% target 6 : 40% target 7 : 40%		et 3 : 75% target 4 : 75% target 5 : 50% target 6 : 50% target 7 : 50%							et 3 : 100 % target 4 : 100 % target 5 : 100 % target 6 : 100 % target 7 : 100 %			

				Pelayanan Publik 7. % PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai pedoman															
		4.01.01.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	170.000.000	2	170.000.000							10 dok	850.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan	2	2	250.000.000	2	250.000.000							10 dok	1.250.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

				dan anjab															
		4.01.01.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	2	2	400.000.000	2	400.000.000							10 dok	2.000.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	% dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu sesuai pedoman	100%	100 %	34.000.000	100 %	34.000.000							100 %	170.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	17.00	1	17.000							5 dok	85.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			nasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dan Laporan Hasil			0.000		.000								.000		
		4.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil	1	1	17.000.000	1	17.000.000							5 dok	85.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu dan	100%	100 %	170.000.000	100 %	170.000.000							100 %	850.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

				sesuai pedoman															
		4.01.01.2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	170.000.000	12	170.000.000							60 dokumen	850.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100%	100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00							100 %	325.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logisti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00							5 paket	325.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			k Kantor																
		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000							100 %	100.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	0	20.000.000	3	20.000.000							10 buah	100.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

		4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000							100 %	500.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	20	50.000.000	20	50.000.000							100	500.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN: Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan					100%	100 %	4.511.658.850	100 %	6.257.914.592							100 %	6.067.189.145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah			Prosentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	100%		4.511.658.850									100 %	6.067.189.145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase kepuasan pimpinan paerah terhadap pelayanan keprotokolan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pimpinan dareah	100%	100 %	4.511.658.850	100 %	6.257.914.592							100 %	6.067.189.145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	100 %	478.685.000	100 %	1.103.676.800							100 %	1.045.368.477	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya honor dan lembur	100%	12 bulan	478.685.000	12 bulan	1.103.676.800							100 %	1.045.368.477	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100 %	504.605.300	100 %	637.510.800							100 %	624.560.151	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	12 bulan	101.943.000	12 bulan	215.720.700							100 %	214.907.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

				yang dibeli															
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman serta bahan kebersihan kantor	100%	12 bulan	233.015.500	12 bulan	320.808.100							100 %	308.671.151	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	12 bulan	154.454.800	12 bulan	100.982.000							100 %	100.982.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100%	12 bulan	15.192.000	-	-							100 %	15.192.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			undangan	undangan															
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	100%	100 %	46.000.000	100 %	54.005.242							100 %	52.361.353	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12 bulan	46.000.000	12 bulan	54.005.242							100 %	52.361.353	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Baran	Presentase pemenuhan	100%	100 %	167.743.	100 %	347.69							100 %	339.84	Bagian Prokopim	Kabupaten

			g Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah			500		1.150								0.300		Jember
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan jabatan roda 4 yang dipelihara dan dibayar pajaknya	100%	1 unit	115.865.500	-	-							100 %	115.865.500	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			Lapangan																
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan jabatan roda 4 yang dipelihara dan dibayar pajaknya	100%	12 unit	36.216.000	100 %	312.691.150							100 %	306.274.700	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah bulan terlaksanakannya Pemeliharaan Peralatan	100%	45 kali	15.662.000	100 %	35.000.000							100 %	33.565.600	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			Lainnya	dan Mesin Lainnya															
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100 %	3.314.625.050	100 %	4.115.030.600							100 %	4.005.058.864	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan	100%	800 kegiatan	1.151.041.150	800 kegiatan	1.391.134.800							100 %	1.381.235.064	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	800 kegiatan	2.163.583.900	800 kegiatan	2.723.895.800							100 %	2.623.823.800	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
SESUDAH PERUBAHAN																			

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)				Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	90%					98,29%		98,31%		98,37%		99,54%		Bag. Tapem	Kabupaten Jember
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel			Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	90%					93%		95%		96%		98%		Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terpenuhi	60%					82%	1.583.964.750	86%	1.596.488.705	93%	1.624.560.890	98%	1.650.339.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%					100 %	42.637.980	100 %	42.637.980	100%	42.637.980	100 %	42.637.980	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangk	2 dokumen					2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.000	2 dokumen	4.126.	Bag. Tapem	Kabupaten

			n Perangkat Daerah	at Daerah													000		Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume	1 dokumen					1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

				n Perubahan RKA-SKPD															
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen					1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200	1 dokumen	4.5 60. 200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

				Perubahan DPA-SKPD															
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen					1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	1 dokumen	4.560.200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase administrasi keuanga	100%					100 %	413,780,075.00	100 %	413,780,075.00	100%	413,780,075.00	100 %	413,780,075.00	Bag. Tapem	Kabupaten

			Daerah	n yang terkelola															Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen					12 dokumen	413,780,075.00	12 dokumen	413,780,075.00	12 dokumen	413,780,075.00	12 dokumen	413,780,075.00	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada PD	100%					100%	7.100.000	100%	7.100.000	100%	7.100.000	100%	7.100.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen					2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000	2 dokumen	3.420.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			Daerah SKPD															
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan					1 laporan	3.680.000	1 laporan	3.680.000	1 laporan	3.680.000	1 laporan	3.680.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%					100%	492.620.000	100%	492.620.000	100%	492.620.000	100%	492.620.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 paket					2 paket	2.145.000	2 paket	2.145.000	2 paket	2.145.000	2 paket	2.145.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			Tangga	yang Disediakan															
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket					12 paket	3.547.000	12 paket	3.547.000	12 paket	3.547.000	12 paket	3.547.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket					5 paket	103.448.000	5 paket	103.448.000	5 paket	103.448.000	5 paket	103.448.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjun	2 laporan					2 laporan	62.880.000	2 laporan	62.880.000	2 laporan	62.880.000	2 laporan	62.880.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

				gan Tamu															
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan					12 laporan	320.600.000	12 laporan	320.600.000	12 laporan	320.600.000	12 laporan	320.600.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan PD	100%					100 %	163.680.000	100 %	163.680.000	100%	163.680.000	100 %	163.680.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	2 paket					2 paket	35.260.000	2 paket	35.260.000	2 paket	35.260.000	2 paket	35.260.000	Bag. Tapem	Kabupaten

				Disediakan															Jember
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit					4 unit	128.420.000	4 unit	128.420.000	4 unit	128.420.000	4 unit	128.420.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100 %	25.650.000	100 %	25.650.000	100%	25.650.000	100 %	25.650.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan					2 laporan	15.650.000	2 laporan	15.650.000	2 laporan	15.650.000	2 laporan	15.650.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan					2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90%					100 %	79.117.000	100 %	79.117.000	100%	79.117.000	100 %	79.117.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Peme	Jumlah Kendaraan Peroran	7 unit					7 unit	55.010	7 unit	55.010	7 unit	55.010	7 unit	55.010	Bag. Tapem	Kabupaten

			liharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	gan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							.000		.000		.000		.000		Jember
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit					10 unit	12.745.000	10 unit	12.745.000	10 unit	12.745.000	10 unit	12.745.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit					18 unit	11.362.000	18 unit	11.362.000	18 unit	11.362.000	18 unit	11.362.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

			dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara															
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	90%					100 %	1.965.254.500	100 %	2.245.558.500	100%	2.317.256.830	100 %	2.493.544.765	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	90%					100 %	1.965.254.500	100 %	2.245.558.500	100%	2.317.256.830	100 %	2.493.544.765	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN	Persentase fungsi pemerintahan	84,15 %					98,25%	1.325.224	98,73%	1.696.574	99,02 %	1.882.563	99,25%	2.024.325	Bag. Tapem	Kabupaten

			DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi							.580		.400		.920		.560		Jember
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	93,30%					96,14%	823.454.680	96,60%	956.874.430	97,35%	1.132.486.550	97,80%	1.245.636.800	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen					2 dokumen	263.558.000	2 dokumen	325.410.200	2 dokumen	440.120.900	2 dokumen	505.654.740	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.02.01.02	Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelol	3 dokumen					2 dokumen	356.22	2 dokumen	482.89	2 dokumen	560.33	2 dokumen	689.85	Bag. Tapem	Kabupaten

			Kewilayahan	aan Administrasi Kewilayahan							8.700		0.230		4.700		8.420		Jember
		4.01.02.02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen					2 dokumen	377.446.210	2 dokumen	540.556.300	2 dokumen	697.560.250	2 dokumen	810.750.200	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	75%					100 %	236.889.140	100 %	397.875.600	100%	553.686.900	100 %	647.752.410	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50 dokumen					50 dokumen	64.180.000	50 dokumen	64.180.000	50 dokumen	64.180.000	50 dokumen	64.180.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember

		4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen					1 dokumen	82.490.000	1 dokumen	82.490.000	1 dokumen	82.490.000	1 dokumen	82.490.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan					1 laporan	11.780.000	1 laporan	11.780.000	1 laporan	11.780.000	1 laporan	11.780.000	Bag. Tapem	Kabupaten Jember
	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar			Persentase kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	100%					95%		95%		95%		95%		Bag. Kesra	Kabupaten Jember

	umat beragama																	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang tercukupi	90%					90%	2.600.000.000	90%	2.600.000.000	90%	2.600.000.000	90%	10.400.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	90%					100%	625.000.000	100%	625.000.000	100%	625.000.000	100%	2.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administ	90%					12 laporan	625.000.000	12 laporan	625.000.000	12 laporan	625.000.000	60 Laporan	2.500.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			Tugas ASN	rasi Pelaksanan Tugas ASN													.000		
		4.01.01.20.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	80%					85%	931.250.000	85%	931.250.000	85%	931.250.000	85%	3.725.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.02	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	80%					2 paket	125.000.000	2 paket	125.000.000	2 paket	125.000.000	10 Paket	500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	80%					12 paket	250.000.000	12 paket	250.000.000	12 paket	250.000.000	60 Paket	1.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	80%					1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	5 Paket	100.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80%					12 laporan	531.250.000	12 laporan	531.250.000	12 laporan	531.250.000	60 Laporan	2.125.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.20.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan	100%					100 %	37.500.000	100 %	37.500.000	100%	37.500.000	100 %	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

				standar daerah															
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%					12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	60 Laporan	100.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%					12 laporan	12.500.000	12 laporan	12.500.000	12 laporan	12.500.000	60 Laporan	50.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.20.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	75%					85%	75.000.000	85%	75.000.000	85%	75.000.000	85%	300.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			intahan Daerah																
		4.01.02.2.02.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	75%					8 Kendaraan	37.500.000	8 Kendaraan	37.500.000	8 Kendaraan	37.500.000	40 Kendaraan	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	75%					15 Peralatan	37.500.000	15 Peralatan	37.500.000	15 Peralatan	37.500.000	75 Peralatan	150.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			Lainnya	Dipelihara															
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase hasil kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan dasar, permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual, kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama	100%					100 %	31.625.000.000	100 %	31.625.000.000	100%	31.625.000.000	100 %	126.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

		4.01.02.20.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bina Mental Spritual, Kesejahteraan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial yang Terlaksana	100%					100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100%	30.000.000.000	100 %	120.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100%					16 Dokumen	3.125.000.000	16 Dokumen	3.125.000.000	16 Dokumen	3.125.000.000	80 Dokumen	12.500.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	100%					4 Dokumen	25.000.000.000	4 Dokumen	25.000.000.000	4 Dokumen	25.000.000.000	20 Dokumen	100.000.000.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			terkait Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial meliputi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Jasa, Tenaga Administrasi, Belanja bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu (guru ngaji)															
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,	100%					3 Dokumen	1.875.000	3 Dokumen	1.875.000	3 Dokumen	1.875.000	15 Dokumen	7.500.000	Bagian Kesra	Kabupaten Jember

			Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat meliputi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela						.000		.000		.000		.000		

				dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan Meningk														

				atnya Jumlah Guru Ngaji dan Penyuluh Agama															
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan			Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi						100 %		100 %		100%		100 %		Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU	Persentase kebutuhan pegawai, operasional dan rutin kantor yang	100%					100 %	1.289.012.200,00	100 %	1.366.626.000,00	100%	1.388.626.000,00	100 %	939.357.660,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

			PATEN /KOTA	tercukupi															
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%					100 %	29.136.000,00	100 %	29.136.000,00	100%	29.136.000,00	100 %	16.196.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 dokumen					7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	3.221.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 dokumen										7 dokumen	6.449.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 dokumen					7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	297.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 dokumen					7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	7.284.000,00	7 dokumen	6.229.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%					100%	425.208.000,00	100%	425.208.000,00	100%	425.208.000,00	100%	599.818.415,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	12 laporan					12 laporan	425.208.000,00	12 laporan	425.208.000,00	12 laporan	425.208.000,00	12 laporan	599.818.415,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

				Tugas ASN															
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0%					100 %	39.200.000,00	100 %	41.000.000,00	100%	41.000.000,00	100 %	41.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Attribut Kelengkapan	0					30 paket	39.200.000,00	30 paket	41.000.000,00	30 paket	41.000.000,00	30 paket	41.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%					100 %	600.916.200,00	100 %	623.330.000,00	100%	645.330.000,00	100 %	418.343.245,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor guna menunjang kebutuhan ASN yang tersedia	100%					1 unit	21.629.600,00	1 paket	30.000.000,00	1 paket	35.000.000,00	1 paket	50.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0					1 paket	14.999.900,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	25.000.000,00	1 paket	30.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%					1 paket	181.546.700,00	1 paket	190.000.000,00	1 paket	200.000.000,00	1 paket	12.397.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetakan	0					1 paket	12.410.00	1 paket	13.000.00	1 paket	15.000.00	1 paket	15.000.00	Bagian Hukum	Kabupaten

			Cetakan dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan						0,00		0,00		0,00		0,00		Jember
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%					12 laporan	370.330.000,00	12 laporan	370.330.000,00	12 laporan	370.330.000,00	12 laporan	310.946.245,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa surat menyurat, jasa telepon dan jasa tenaga administrasi (non ASN)	0%					100 %	154.552.000,00	100 %	207.952.000,00	100%	207.952.000,00	100 %	207.952.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0%					12 laporan	5.250.	12 laporan	9.250.	12 laporan	9.250.	12 laporan	9.250.	Bagian Hukum	Kabupaten

			Menyurat	Surat Menyurat							000,00		000,00		000,00		000,00		Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0%					12 laporan	2.400.000,00	12 laporan	2.400.000,00	12 laporan	2.400.000,00	12 laporan	2.400.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0%					12 laporan	146.902.000,00	12 laporan	196.302.000,00	12 laporan	196.302.000,00	12 laporan	196.302.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Terpenuhinya pemeliharaan kendara	0%					100 %	40.000.00	100 %	40.000.00	100%	40.000.00	100 %	40.000.00	Bagian Hukum	Kabupaten

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	an dinas serta sarana dan prasarana lainnya						0,00		0,00		0,00		0,00		Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0%					20 unit	40.000.000,00	20 unit	40.000.000,00	20 unit	40.000.000,00	20 unit	40.000.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terselenggaranya penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasi	100%					100 %	3.031.812.600,00	100 %	3.031.812.600,00	100%	3.031.812.600,00	70%	1.929.954.750,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

				an produk hukum															
		4.01.02.2.05	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	100%					100 %	3.031.812.600,00	100 %	3.031.812.600,00	100%	3.031.812.600,00	70%	1.929.954.750,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100%					673 dokumen	626.647.000,00	673 dokumen	626.647.000,00	673 dokumen	626.647.000,00	650 dokumen	283.168.550,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum	100%					113 kasus	2.290.965.600,00	113 kasus	2.290.965.600,00	113 kasus	2.290.965.600,00	168 kasus	1.568.036.200,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember

				miskin yang dapat dibantu															
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat	100%					600 dokumen	114.200.000,00	600 dokumen	114.200.000,00	600 dokumen	114.200.000,00	160 dokumen	78.750.000,00	Bagian Hukum	Kabupaten Jember
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan			Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pemban	100%					100 %		100 %		100%		100 %		Bagian Perekonomian dan SDA Bagian AP dan PBJ	

	daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik			gunan, serta PBJ															
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	100%					100 %	**6.429.529.500**	100 %	**6.615.000.000**	100%	**6.700.000.000**	100 %	28.262.654.775	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembina	100%					100 %	6.180.038.900	100 %	6.295.000.000	100%	6.360.000.000	100 %	26.545.485.100	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

				an Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA															
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen					12 Dokumen	371.463.800	12 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	400.000.000	60 Dokumen	2.178.905.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi	12 Laporan					12 Laporan	253.918.000	12 Laporan	275.000.000	12 Laporan	300.000.000	72 Laporan	1.730.530.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

				Perekonomian															
		4.01.03.2.01.03	Perancanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Laporan					12 Dokumen	5.066.408.100	12 Dokumen	5.100.000.000	12 Dokumen	5.100.000.000	72 Laporan	20.419.403.100	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrosisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	0					4 Dokumen	203.669.000	4 Dokumen	220.000.000	4 Dokumen	240.000.000	16 Dokumen	923.669.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordin	0					4 Dok	284.58	4 Dok	300.00	4 Dokumen	320.00	20 dokumen	1.292.978	Bagian Perekonomia	Kabupaten

			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	asi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						umen	0.000	umen	0.000		0.000		.000	n dan SDA	Jember
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	100%					100 %	249.490.600	100 %	320.000.000	100%	340.000.000	100 %	1.717.169.675	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertamb	0					12 dokumen	194.700.600	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	210.000.000	36 dokumen	1.243.463.675	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

			anan, Kelautan dan Perikanan	angan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian															
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	0					4 dokumen	54.790.000	4 dokumen	60.000.000	4 dokumen	65.000.000	20 dokumen	278.706.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

				Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian															
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	0					0	0	4 dokumen	60.000.000	4 dokumen	65.000.000	12 dokumen	195.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

				Pertanahan															
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%					100 %	380.604.000	100 %	274.918.200	100%	274.918.200	100 %	1.758.745.800	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%					100 %	7.600.000	100 %	8.300.000	100%	9.000.000	100 %	52.620.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Laporan					6 Laporan	6.000.000	6 Laporan	6.500.000	6 Laporan	7.000.000	30 Laporan	41.388.800	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	6 Laporan					6 Laporan	1.600.000	6 Laporan	1.800.000	6 Laporan	2.000.000	30 Laporan	11.231.700	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

				Kinerja SKPD															
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	12 Dokumen					100 %	230.000.000	100 %	250.000.000	100%	280.000.000	100 %	1.506.755.700	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					12 Dokumen	230.000.000	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	280.000.000	72 Dokumen	1.506.755.700	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	1 paket					100 %	1.500.000	100 %	31.750.000	100%	32.150.000	100 %	55.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0					0	0	1 paket	300000000	1 paket	300000000	3 paket	90.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket					1 paket	1500000	1 paket	1750000	1 paket	2150000	6 paket	14.236.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0%					100 %	87.500.000	100 %	87.500.000	100%	87.500.000	4 paket	350.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0%					1 paket	87.500.000	1 paket	87.500.000	1 paket	87.500.000	4 paket	350.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	100%					100 %	15.504.000	100 %	16.000.000	100%	17.000.000	100 %	93.582.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan					12 laporan	15.504.000	12 laporan	16.000.000	12 laporan	17.000.000	72 Laporan	93.582.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase barang milik daerah	100%					100 %	38.500	100 %	43.000	100%	48.500	100 %	258.79	Bagian Perekonomia	Kabupaten

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang terpelihara						.000		.000		.000		6.000	n dan SDA	Jember
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit					1 Unit	21.000.000	1 Unit	24.000.000	1 Unit	27.000.000	6 unit	140.680.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit					20 Unit	17.500.000	20 Unit	19.000.000	20 Unit	21.500.000	120 unit	118.116.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Jember
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Kantor	100%					100 %	2.460.544.350	100 %	2.706.598.785	100%	2.977.258.664	100 %	15.896.559.328	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%					100 %	1.282.465.800	100 %	1.410.712.380	100%	1.551.783.618	100 %	8.022.984.778	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan	Kabupaten Jember

																		Barang Jasa	
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium 12 Bulan yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	936.449.800	12 Bulan	1.030.094.780	12 Bulan	1.133.104.258	100 %	5.789.484.522	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik, Non Fisik dan Anggaran OPD	72 OPD					72 OPD	346.016.000	72 OPD	380.617.600	72 OPD	418.679.360	100 %	2.233.500.256	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan	100%					100 %	333.014.550	100 %	366.316.005	100%	402.947.606	100 %	880.566.945	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan	Kabupaten Jember

			Daerah	Kendaraan Dinas														Barang Jasa	
		4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Aparatur Negara yang Terlaksana	4 Paket					4 Paket	185.168.500	4 Paket	203.685.350	4 Paket	224.053.885	100%	880.566.945	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%					100%	57.260.280	100%	62.986.308	100%	69.284.939	100%	2.584.502.527	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengg	Jumlah Paket Pengadaan	10 Paket					10 Paket	90.585.770	10 Paket	99.644.347	10 Paket	109.608.782	100%	1.214.902.009	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan	Kabupaten Jember

			andaan															Barang Jasa	
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	15 Paket					15 Paket	633.468.000	15 Paket	696.814.800	15 Paket	766.496.280	100%	767.814.909	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	4 Paket					4 Paket	535.452.500	4 Paket	588.997.750	4 Paket	647.897.525	100%	601.785.609	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan & Pemeliharaan Sarana dan	100%					100%	5.808.000	100%	6.388.800	100%	7.027.680	100%	3.915.034.988	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan	Kabupaten Jember

			Daerah	Prasarana Kantor														Barang Jasa	
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Horonarium / Gaji Tenaga Non ASN dan Mamin Kebutuhan Pegawai (12 Bulan) yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	4.207.500	12 Bulan	4.628.250	12 Bulan	5.091.075	100 %	3.282.835.053	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Biaya Telepon (12 Bulan) yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	88.000.000	12 Bulan	96.800.000	12 Bulan	106.480.000	100 %	37.514.928	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek Bank yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	77.451.000	12 Bulan	85.196.100	12 Bulan	93.715.710	100 %	26.277.008	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Kerja	12 Bulan					12 Bulan	27.351.500	12 Bulan	30.086.650	12 Bulan	33.095.315	100 %	568.408.000	Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%					100 %	50.099.500	100 %	55.109.450	100%	60.620.395	100 %	493.470.091	Kasubbag Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember

			Pemerintahan Daerah																
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit					1 Unit	134.145.000	1 Unit	147.559.500	1 Unit	162.315.450	100 %	172.418.312	Kasubbag Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kantor	9 Unit					9 Unit	134.145.000	9 Unit	147.559.500	9 Unit	162.315.450	100 %	321.051.780	Kasubbag Pembinaan & Advok	Kabupaten Jember

			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Yang Dipelihara														asi Pengadaan Barang Jasa	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Inflasi	100%					100 %	3.262.801.300	100 %	3.589.081.430	100%	3.947.989.573	100 %	21.171.570.833	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pemb	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis,	3 Buku					3 Buku	507.551.000	3 Buku	558.306.100	3 Buku	614.136.710	100 %	3.279.914.191	Kasubbag Penyusunan Program &	Kabupaten Jember

			angunan	Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD													Pengendalian Program	
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan yang Terfasilitasi	3 Buku					3 Buku	507.551.000	3 Buku	558.306.100	3 Buku	614.136.710	100 %	17.891.656.642	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	100%					100 %	2.755.250.300	100 %	3.030.775.330	100%	3.333.852.863	100 %	13.249.053.402	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dan LPSE	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan	Jumlah Pembayaran Honorari	12 Bulan					12 Bulan	2.053.225	12 Bulan	2.258.548	12 Bulan	2.484.403	100 %	4.542.603	Kasubbag Pengelolaan	Kabupaten

			Barang dan Jasa	um UKPBJ - 12 Bulan yang terpenuhi							.900		.490		.339		.240	Pengadaan Barang Jasa dan LPSE	Jember
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pembayaran Honorarium LPSE - 12 Bulan yang terpenuhi	12 Bulan					12 Bulan	702.024.400	12 Bulan	772.226.840	12 Bulan	849.449.524	100 %	100.000.000	Kasubbag Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Kabupaten Jember
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terpenuhi	600 Orang					600 Orang	75.000.000	600 Orang	80.000.000	600 Orang	85.000.000	100 %		Bagian Umum	Kabupaten Jember
	Meningkatnya kualitas pelayan			Indeks Kepuasan Masyara	100%					100 %		100 %		100%		100 %		Bagian Umum	Kabupaten

	an prima kepada pimpinan			kat (IKM)															Jember
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%					100 %	Rp 64.064.449.536	100 %	Rp 50.993.669.536	100%	Rp 50.993.669.536	100 %	41.862.173.500	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%					100 %	Rp 19.947.813.216	100 %	Rp 19.947.813.216	100%	Rp 19.947.813.216	100 %	17.507.267.787	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjan	Persentase Penyediaan Gaji dan	100%					100 %	Rp 16.558.91	100 %	Rp 16.558.91	100%	Rp 16.558.91	100 %	15.514.42	Bagian Umum	Kabupaten

			gan ASN	Tunjangan ASN							3.216		3.216		3.216		2.787		Jember
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%					100 %	Rp 3.388.900.000	100 %	Rp 3.388.900.000	100%	Rp 3.388.900.000	100 %	1.992.845.000	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%					100 %	Rp 22.500.000	100 %	Rp 22.500.000	100%	Rp 22.500.000	100 %	17.526.314	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%					100 %	Rp 22.500.000	100 %	Rp 22.500.000	100%	Rp 22.500.000	100 %	17.526.314	Bagian Umum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%					100 %	Rp 365.625.000	100 %	Rp 365.625.000	100%	Rp 365.625.000	100 %	385.866.369	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%					100 %	Rp 365.625.000	100 %	Rp 365.625.000	100%	Rp 365.625.000	100 %	385.866.369	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	90%					100 %	Rp 22.700.712.430	100 %	Rp 18.700.712.430	100%	Rp 18.700.712.430	100 %	10.506.368.270	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen	Persentase Penyediaan	100%					100 %	Rp 199.57	100 %	Rp 199.57	100%	Rp 199.57	100 %	207.88	Bagian Umum	Kabupaten

			Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							3.700		3.700		3.700		7.556		Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%					100 %	Rp 12.081.735.130	100 %	Rp 8.081.735.130	100%	Rp 8.081.735.130	100 %	237.773.852	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%					100 %	Rp 520.078.600	100 %	Rp 520.078.600	100%	Rp 520.078.600	100 %	8.946.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan	100%					100 %	Rp 3.371.268.000	100 %	Rp 3.371.268.000	100%	Rp 3.371.268.000	100 %	4.200.244.012	Bagian Umum	Kabupaten Jember

				Logistik Kantor															
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%					100 %	Rp 190.380.000	100 %	Rp 190.380.000	100%	Rp 190.380.000	100 %	229.251.970	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%					100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100%	6.000.000	100 %	-	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%					100 %	Rp 2.839.660.000	100 %	Rp 2.839.660.000	100%	Rp 2.839.660.000	100 %	2.840.530.643	Bagian Umum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%					100 %	Rp 3.492.017.000	100 %	Rp 3.492.017.000	100%	Rp 3.492.017.000	100 %	2.781.733.937	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**					100 %	Rp 8.963.956.290	100 %	Rp 8.963.956.290	100%	Rp 8.963.956.290	100 %	6.488.560.304	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%					100 %	Rp 326.405.970	100 %	Rp 326.405.970	100%	Rp 326.405.970	100 %	166.078.050	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa	Persentase Penyedi	100%					100 %	Rp 2.477.	100 %	Rp 2.477.	100%	Rp 2.477.	100 %	2.515.991	Bagian Umum	Kabupaten

			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	aan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							972.820		972.820		972.820		.704		Jember
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%					100 %	Rp 2.278.297.500	100 %	Rp 2.278.297.500	100%	Rp 2.278.297.500	100 %	1.626.637.100	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%					100 %	Rp 3.881.280.000	100 %	Rp 3.881.280.000	100%	Rp 3.881.280.000	100 %	2.179.853.450	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daera	Persentase barang milik daerah yang	100%					100 %	Rp 9.070.780	100 %	Rp 9.070.780	100%	Rp 9.070.780	100 %	4.630.162.835	Bagian Umum	Kabupaten Jember

			h Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpelihara						.000		.000		.000				
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%											100%	954.435.243	Bagian Umum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%											100 %	1.973.615.538	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Mebel	100%					100 %	Rp 200.000.000	100 %	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan	Persentase Pemeliharaan peralatan dan	100%					100 %	Rp 1.100.405	100 %	Rp 1.100.405	100%	Rp 1.100.405	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember

			mesini lainnya	mesini lainnya							.000		.000		.000				
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%					100%	Rp 3.420.125.000	100%	Rp 3.420.125.000	100%	Rp 3.420.125.000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%					100%	Rp 1.780.750.000	100%	Rp 1.780.750.000	100%	Rp 1.780.750.000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%					100 %	Rp 200.000.000	100 %	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%					100 %	Rp 455.750.000	100 %	Rp 455.750.000	100%	Rp 455.750.000	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana	Persentase Penyedi	100%					100 %	Rp 1.125.	100 %	Rp 1.125.	100%	Rp 1.125.	100 %	959.64	Bagian Umum	Kabupaten

			Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	aan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						000.000		000.000		000.000		1.500		Jember
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%					100 %	Rp 1.212.312.600	100 %	Rp 1.212.312.600	100%	Rp 1.212.312.600	100 %	1.075.450.400	Bagian Umum	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100%					100 %	Rp 707.374.000	100 %	Rp 707.374.000	100%	Rp 707.374.000	100 %	618.543.300	Bagian Umum	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100%					100 %	Rp 504.938.600	100 %	Rp 504.938.600	100%	Rp 504.938.600	100 %	456.907.100	Bagian Umum	Kabupaten Jember
Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Nilai SAKIP	61,60 (B)					73,47 (BB)		77,26 (BB)		80,12 (A)		80,56 (A)		Bagian Organisasi	Kab. Jember
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akunta			Indeks Pelayanan Publik	N/A					3,25 (B-)		3,50 (B-)		3,75 (B)		4,51 (A-)		Bagian Organisasi	Kab. Jember

	bel, Efektif dan Efisien, dan Pelayanan Publik yang prima																		
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38%					100 %	1.159.000.000	100 %	1.159.000.000	100%	1.159.000.000	90%	4.636.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13	Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan kelembagaan, akuntabilitas	50%					100 %	820.000.000	100 %	820.000.000	100%	820.000.000	100 %	3.280.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

				kinerja, dan reformasi birokrasi yang terfasilitasi															
		4.01.01.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan					2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	10 dok	680.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13.03	Peningkatan Kinerja dan RB	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	2 dokumen					2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10 dok	1.000.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan	2 dokumen					2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	10 dok	1.600.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

				dan anjab															
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%					100 %	34.000.000	100 %	34.000.000	100%	34.000.000	100 %	136.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen					1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	5 dok	68.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1 dokumen					1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	5 dok	68.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

			Perubahan RKA-SKPD	laporan hasil															
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%					100 %	170.000.000	100 %	170.000.000	100%	170.000.000	100 %	680.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen					12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	60 dokumen	680.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%					100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100 %	260.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 dokumen					1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	5 paket	260.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100%	20.000.000	100 %	80.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0					2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10 buah	80.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember

		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%					100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100%	50.000.000	100 %	200.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit					20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	100	200.000.000	Bagian Organisasi	Kab. Jember
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME	Persentase pelayanan keprotokolan, komunikasi, dan	100%					100 %	6.257.914.592	100 %	7.147.914.592	100%	7.597.914.592	100 %	6.067.189.145	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			RINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dokumentasi pimpinan yang terfasilitasi															
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100%					100 %	1.2 03. 676 .80 0	100 %	1.3 03. 676 .80 0	100%	1.4 03. 676 .80 0	100 %	1.0 45. 368 .47 7	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya honor dan lembur	100%					12 bulan	1.2 03. 676 .80 0	12 bulan	1.3 03. 676 .80 0	12 bulan	1.4 03. 676 .80 0	100 %	1.0 45. 368 .47 7	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Presentase pemenuhan kebutuh	100%					100 %	667 .51	100 %	687 .51	100%	717 .51	100 %	624 .56 0.1 51	Bagian Prokopim	Kabupaten

			Daerah	an dan pemeliharaan sarana prasarana kantor							0.800		0.800		0.800				Jember
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100%					12 bulan	225.720.700	12 bulan	235.720.700	12 bulan	245.720.700	100 %	214.907.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman serta bahan kebersihan kantor	100%					12 bulan	330.808.100	12 bulan	330.808.100	12 bulan	340.808.100	100 %	308.671.151	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%					12 bulan	110.982.000	12 bulan	120.982.000	12 bulan	130.982.000	100%	100.982.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%					-	-	-	-	-	-	100%	15.192.000	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan	100%					100%	64.005.242	100%	74.005.242	100%	84.005.242	100%	52.361.353	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

				standar daerah															
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%					12 bulan	64.005.242	12 bulan	74.005.242	12 bulan	84.005.242	100 %	52.361.353	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	100%					100 %	457.691.150	100 %	567.691.150	100%	677.691.150	100 %	339.840.300	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan jabatan roda 4 yang dipelihara dan dibayar pajaknya	100%					-	-	-	-	-	-	100 %	115.865.500	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan jabatan roda 4 yang dipelihara dan dibayar pajaknya	100%					12 unit	412.69.1.1.50	12 unit	512.69.1.1.50	12 unit	612.69.1.1.50	100 %	306.274.700	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terlaksanakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%					45 kali	45.000.000	45 kali	55.000.000	45 kali	65.000.000	100 %	33.565.600	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%					100 %	4.315.030.600	100 %	4.515.030.600	100%	4.715.030.600	100 %	4.005.058.864	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan	100%					800 kegiatan	1.491.134.800	800 kegiatan	1.591.134.800	800 kegiatan	1.691.134.800	100%	1.381.235.064	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%					800 kegiatan	2.823.895.800	800 kegiatan	2.923.895.800	800 kegiatan	3.023.895.800	100%	2.623.823.800	Bagian Prokopim	Kabupaten Jember

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
SEBELUM PERUBAHAN									
Bagian Tata Pemerintahan									
1	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Jumlah OPD yang Menyusun	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	LPPD sesuai Petunjuk								
3	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	70%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
4	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti ;	91%	95%	97%	97%	98%	97%	98%	98%
6	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja dan sesuai dengan pedoman	91%	95%	97%	97%	98%	97%	98%	98%

7	Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	86%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	95%	95%	95%	97%	98%	98%
9	Persentase peningkatan kerjasama daerah	75%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	97%	96%	94%	96%	98%	98%	98%
11	Persentase pembakuan nama rupabumi yang	94%	97%	96%	94%	96%	98%	98%	98%

	terinventarisir								
Bagian Kesra									
1	Jumlah event yang diikuti/dilaksanakan	60%	70%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Persentase Calon jamaah Haji tiba di tanah suci dan kembali ke tanah air	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kegiatan keagamaan yang terselenggara	50%	50%	90%	90%	90%	100%	100%	95%
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai dengan standar daerah	30%	66%	66%	66%	100%	66%	100%	100%

6	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase tingkat partisipasi aparatur	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pesentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Hukum									
1	Persentase Peraturan Daerah yang diusulkan ke DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peraturan Bupati yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Keputusan Bupati yang dihasilkan	70%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
4	Prosentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase bantuan hukum bagi	90%	91%	92%	93%	95%	97%	97%	97%

	masyarakat miskin								
6	Persentase jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Penyuluhan Hukum	2	2	6	6	6	6	6	6
8	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	0	0	2	4	4	4	4	4
Bagian Perekonomian dan SDA									
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	71 dokumen
2	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72 laporan

3	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72 laporan
4	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrosisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	0	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	16 dokumen
5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 dokumen
6	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,	0	0	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen

	Perhubungan, Statistik, Persandian								
7	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
8	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	0	0	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ									

1	Indikator Tujuan : Meningkatnya tertib administrasi pembangunan Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	% Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	% Pelayanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Umum									
1	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Operasional (SOP) dalam rangka melaksanakan urusan administrasi pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Organisasi									

1	Indeks Pelayanan Publik	2.51 (C)	2.75 (C)	3.00 (C)	3.25 (B-)	3.50 (B-)	3.75 (B)	4.01 (A-)	4.01 (A-)
2	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	60.75 (B)	69.00 (B)	70.47 (BB)	73.47 (BB)	77.26 (BB)	80.12 (A)	80.56 (A)	80.56 (A)
3	% UPP yang menindaklanjuti hasil pemantauan kepatuhan standar pelayanan publik	N/A	40%	50%	75%	75%	75%	75%	75%
4	% PD yang melakukan Inovasi Pelayanan Publik	6%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5	% PD yang menerapkan ketatalaksanaan sesuai pedoman	60%	40%	50%	75%	75%	75%	75%	75%
6	% Dokumen SAKIP PD berkualitas Baik	40%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%
7	% Hasil Monev Kelembagaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	% kompetensi jabatan	10%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	sesuai pedoman								
9	% dokumen anjab/ ABK sesuai pedoman	2.51 (C)	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	dan Media Massa								
6	Presentase Prog. Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Presentase Pengembangan Dokumentasi Dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Presentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SETELAH PERUBAHAN									
1	**Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**	**90%**			**98,29 %**	**98,31 %**	**98,37 %**	**98,46 %**	**99,54%**
2	**Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi**	**90%**			**93%**	**95%**	**96%**	**97%**	**98%**
3	**Persentase kualitas**	**100%**			**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**

	kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama								
4	**Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	**Persentase peningkatan sinergitas di bidang perekonomian dan SDA, bidang administrasi pembangunan, serta PBJ**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
6	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	**Nilai SAKIP**	**61,60 (B)**			**73,47 (BB)**	**77,26 (BB)**	**80,12 (A)**	**80,56 (A)**	**80,56 (A)**
8	**Indeks Pelayanan Publik**	**N/A**			**3,25 (B-)**	**3,50 (B-)**	**3,75 (B)**	**4,51 (A-)**	**4,51 (A-)**

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Sekretariat DaerahKabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, Desember 2022
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 2 002